



2023 LAPORAN KINERJA

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
KUWAIT CITY

KATA PENGANTAR

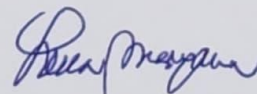
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja KBRI Kuwait City Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini merupakan sarana akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada KBRI Kuwait City atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen KBRI Kuwait City dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dasar hukum penyusunan LKj KBRI Kuwait City Tahun 2023 adalah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya untuk mencapai sasaran kerja yang akuntabel, KBRI Kuwait City melakukan evaluasi kinerja kegiatan secara periodik sistematis. LKj KBRI Kuwait City Tahun 2023 membandingkan target indikator utama dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

LKj KBRI Kuwait City Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai capaian kinerja maupun pemanfaatan anggaran secara terukur kepada berbagai pihak berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj KBRI Kuwait City Tahun 2023 juga diharapkan dapat menjadi tolok ukur serta mendorong kinerja KBRI Kuwait City menjadi lebih produktif, profesional, efektif dan efisien di masa depan serta memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kuwait City, Januari 2024



Lena Maryana

Duta Besar LBBP RI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perwakilan RI di Kuwait tahun 2023 telah ditandatangani bersama Menteri Luar Negeri pada 31 Januari 2023. PK tahun 2023 ini dilengkapi dengan penyusunan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dilengkapi dengan Manual IKU dan penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) PK 2023. Informasi dokumen ini telah dimuat dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri, namun belum terunggah pada aplikasi e-kinerja.kemlu.go.id (AKSI) dikarenakan masih terdapat gangguan pada system aplikasi.

Secara umum, pelaksanaan program kerja KBRI Kuwait City sepanjang tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun terdapat hambatan pada triwulan keempat tahun 2023. Pemerintah Kuwait memberlakukan larangan penyelenggaraan aktifitas publik yang bersifat kesenian, hiburan, dan kegiatan-kegiatan serupa yang mengumpulkan banyak massa, dikarenakan adanya aksi solidaritas dari Pemerintah Kuwait terhadap situasi politik di Palestina mulai pada bulan September 2023, dan dilanjutkan dengan masa berkabung atas berpulangnya Amir Kuwait, Sheikh Nawaf, pada awal Desember 2023.

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) KBRI Kuwait City untuk tahun 2023 berdasarkan pada aplikasi Kinerja Kemlu (AKSI) mencapai 102,65, dengan rincian nilai-nilai perspektif pembentuk sebagai berikut:

Perspektif	Bobot Perspektif	Skor Perspektif
<i>Stakeholder Perspective</i>	25%	109,88
<i>Customer Perspective</i>	15%	113,33
<i>Internal Business Process Perspective</i>	30%	95,91
<i>Learning and Growth Perspective</i>	30%	98,04
Total NCKO	102,65	

(Tabel 1)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) 2023, KBRI Kuwait City memiliki 3 (tiga) program kegiatan, yaitu i) Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional di Perwakilan RI, ii) Pelayanan dan Pelindungan WNI di Perwakilan RI, dan iii) Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum.

Dalam penyelenggaraan diplomasi dan kerjasama internasional di Perwakilan RI, pada November 2023 telah ditandatangani Memorandum Saling Pengertian (MoU) Kerja Sama Sistem Peradilan antara Mahkamah Agung RI dan *Supreme Judicial Council* (SJC) Negara Kuwait. Kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan kunjungan Ketua SJC Kuwait ke Indonesia pada tahun 2024. Kedua negara telah membahas rencana pelaksanaan *Senior Official Meeting* (SOM) dilanjutkan dengan pelaksanaan Sidang Komisi Bersama (SKB) pada tahun 2024.

Di tahun 2023, KBRI Kuwait City mencatat nilai perdagangan antara Indonesia-Kuwait mencapai nilai total sejumlah USD 454.000.000,-. Jumlah komitmen perdagangan antara

kedua negara yang difasilitasi melalui KBRI mencapai 4 komitmen, yaitu komitmen perdagangan antara 1). Kuwait Paper Industry (KPI) dan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), 2). PT. Banglele Indonesia dan Cross Border Co., 3). PT. BIM Fasilitas dan CBC Kuwait, dan 4). Penjualan World Sweet Central (WSCC) kepada PT. Kaldusari Nabati. Untuk meningkatkan kerja sama perdagangan kedua negara, KBRI Kuwait City juga telah melaksanakan *Indonesia Trade Tourism Forum and Exhibition* (ITTFE) pada bulan November 2023.

Untuk kerja sama Investasi, KBRI Kuwait City mencatat 2 komitmen investasi yaitu komitmen investasi KUFPEC di beberapa proyek migas Indonesia dan ketertarikan LAMAC Plus untuk berinvestasi di sektor industri makanan di Indonesia. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI, nilai investasi kedua negara mencapai USD 362.500,-. Sebagai salah satu upaya meningkatkan kerja sama investasi kedua negara, KBRI Kuwait City telah mengadakan *Indonesia Investment Forum* (IIF) pada bulan Mei 2023.

Di bidang kerja sama ketenagakerjaan, Indonesia dan Kuwait sedang menyusun Nota Kesepahaman di bidang penempatan PMI sektor kesehatan di Kuwait.

Promosi budaya dan pariwisata dilaksanakan dengan baik melalui akun media sosial KBRI dan beberapa penyelenggaraan kegiatan promosi. Kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh KBRI Kuwait City adalah *Indonesia Spice Up the World*, *Indonesian Day*, Resepsi Diplomatik, dan *Indonesian Winter Market*. Selain itu, KBRI juga aktif berpartisipasi pada kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh beberapa pihak terkait di negara akreditasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Perwakilan RI sepanjang tahun 2023, layanan pelindungan WNI dan kekonsuleran berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti. Jumlah WNI di Negara Kuwait yang terdata oleh KBRI Kuwait City berdasarkan Kerjasama dengan otoritas keimigrasian setempat, adalah 6.164. Sepanjang tahun 2023, total kasus WNI yang difasilitasi dan ditangani oleh KBRI adalah 162 kasus, dengan mayoritas kasus terkait isu keimigrasian. Untuk Layanan Kekonsuleran, tercatat sejumlah 3.312 dokumen kekonsuleran telah dikeluarkan oleh KBRI.

Realisasi Belanja Perwakilan RI Kuwait pada TA 2023 adalah sebesar Rp30,177,123,701 atau 94,41 persen dari anggaran Pagu Anggaran sebesar Rp31,962,525,000. Selama periode berjalan, KBRI Kuwait City telah melakukan revisi sebanyak 4 kali Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya refocusing anggaran sehingga diperlukan revisi anggaran untuk optimalisasi dan adanya Anggaran Belanja Tambahan untuk keperluan belanja pegawai pada semester II dan juga melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS maupun valuta setempat.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sejak terjalinnya hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Negara Kuwait pada tahun 1968, KBRI Kuwait City telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat fondasi dan mengembangkan kerja sama bilateral yang mendukung kepentingan nasional Indonesia. Di tahun 2023, KBRI Kuwait City telah melaksanakan program kerja pada masing-masing fungsi yang diselaraskan dengan Sasaran Program, Indikator Kinerja Utama dan Target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKJ) KBRI Kuwait City tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Peraturan Pemerintah.

Laporan Kinerja KBRI Kuwait City ini disusun sebagai perwujudan dan komitmen KBRI Kuwait City dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bagian dari Organisasi Kementerian Luar Negeri, LKJ KBRI Kuwait merupakan bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap upaya pencapaian target kinerja dan penggunaan sumber daya yang telah disepakati pada Perjanjian Kinerja 2023. Selanjutnya, LKJ ini menjadi catatan terhadap berbagai kendala, hambatan serta rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh KBRI Kuwait City guna peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.

KBRI Kuwait City terus berupaya dalam hal penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran yang sesuai dengan visi dan misi Presiden Indonesia. Guna menyukseskan pelaksanaan tugas tersebut, KBRI Kuwait City memahami keutamaan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokumen AKIP dimaksud merupakan panduan KBRI Kuwait City untuk melakukan proses suatu kegiatan yang teratur dimulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut yang berorientasi untuk pencapaian kepentingan Nasional dan sesuai dengan tugas dan fungsi KBRI Kuwait City.

I.1.2 Tugas dan Fungsi

Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: SK.06/A/OT/VI/2004/01 tanggal 1 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Indonesia di Luar Negeri menyatakan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Negara Kuwait.

KBRI Kuwait City bertugas melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Wilayah Akreditasi Kuwait, sesuai dengan

kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok perwakilan di atas, maka sesuai Keputusan Presiden No.108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri, KBRI Kuwait menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Negara Kuwait;
- b. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
- c. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terhadai ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional;
- d. Pengamatan, penilaian dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Negara Kuwait;
- e. Konsuler dan protokol;
- f. Perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Kuwait;
- g. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
- h. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

I.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KBRI Kuwait City berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: SK.06/A/OT/VI/2004/01 tanggal 1 Juni 2004, adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan : Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh
- b. Unsur Pelaksana :
 1. Minister Counsellor
 2. Counsellor
 3. Sekretaris II
 4. Sekretaris III
 5. Atase Tenaga Kerja
- c. Unsur Penunjang :
 1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan
 2. Petugas Komunikasi

Indeks KBRI Kuwait City adalah 2,86 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. Fungsi Politik : 2,36
- b. Fungsi Ekonomi : 3,23
- c. Fungsi Pensosbud : 2,50
- d. Fungsi Konsuler : 3,50

Berdasarkan pada pertimbangan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Negara Kuwait, maka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi KBRI Kuwait pada tahun anggaran 2023 dilaksanakan oleh Unsur Pimpinan, yaitu Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh selaku Kepala Perwakilan, dan dibantu oleh 5 (lima) orang Unsur Pelaksana, dan 2 (dua) orang Unsur Penunjang, yang terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan (1 orang)
 - Kepala Perwakilan RI, yaitu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP)

2. Unsur Pelaksana (5 orang)
 - 2 (dua) orang Minister Counsellor, masing-masing selaku Pelaksana Fungsi Politik dan Pelaksana Fungsi Ekonomi
 - 1 (satu) orang Sekretaris I, selaku Pelaksana Fungsi Pensodbud
 - 1 (satu) orang Sekretaris III, selaku Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler
 - 1 (satu) orang Atase Tenaga Kerja
3. Unsur Penunjang (2 orang)
 - 1 (satu) orang Petugas Komunikasi
 - 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan (BPKRT)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, dapat diuraikan tugas masing-masing Fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi Politik mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan RI dalam menjalin, meningkatkan hubungan dan kerja sama di bidang politik dan keamanan antara Indonesia dan Kuwait. Dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan tugas sebagai berikut:
 - a. Peningkatan hubungan dan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.
 - b. Perwakilan pemerintah RI dalam memperjuangkan kepentingan nasional di negara penerima dan/atau organisasi internasional.
 - c. Perwakilan pemerintah RI dalam berbagai forum bilateral, regional dan multilateral.
 - d. Pengembangan jejaring dan negosiasi dengan berbagai pihak, meliputi kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa dan organisasi/lembaga non pemerintah, mengenai kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
 - e. Pelaksanaan tugas seremonial kenegaraan dan pemerintahan, pemeliharaan dan peningkatan hubungan secara umum dengan organisasi/lembaga non pemerintah, kelompok masyarakat dan/atau kelompok kepentingan di bidang politik, keamanan, hukum, dan HAM.
 - f. Peningkatan kerja sama dan penanganan masalah di bidang politik, keamanan, hukum, dan HAM yang mencakup isu kontemporer seperti terorisme, kejahatan transnasional yang terorganisir, pemerintahan yang baik, pencucian uang, penyelundupan barang dan manusia, narkoba, dan imigran gelap.
 - g. Penjajakan dan peningkatan kerja sama mengenai penanganan isu-isu spesifik di bidang politik, keamanan, hukum, dan HAM.
 - h. Pemantapan dukungan seluas-luasnya bagi kepentingan nasional, terutama keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, baik di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
 - i. Penyiapan dan pembuatan perjanjian internasional.
 - j. Pengamatan, analisis, dan pelaporan perkembangan politik di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional yang berkaitan dengan/atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat.
 - k. Penyebarluasan informasi mengenai situasi dan perkembangan politik Indonesia di berbagai forum melalui berbagai program dan kegiatan.
 - l. Pelaksanaan kunjungan kerja dalam rangka kajian wilayah dan peningkatan kerja sama dengan Negara Penerima.

- m. Penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama antara Indonesia dengan Negara Penerima.
 - n. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi Atase Pertahanan dan Atase Teknis terkait.
 - o. Pelaksanaan misi khusus atau misi lain yang ditugaskan oleh pemerintah RI dan/atau Kepala Perwakilan RI.
2. Fungsi Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan RI dalam menjalin dan meningkatkan hubungan dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Kuwait. Dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan tugas sebagai berikut:
- a. Peningkatan hubungan dan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.
 - b. Perwakilan pemerintah RI dalam memperjuangkan kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
 - c. Perwakilan pemerintah RI dalam berbagai forum bilateral, regional, dan multilateral.
 - d. Pengembangan jejaring dan negosiasi dengan berbagai pihak meliputi kalangan pemerintah, akademisi, media massa, pengusaha, kamar dagang dan industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan dan organisasi/lembaga non pemerintah mengenai kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
 - e. Penjajakan dan peningkatan kerja sama perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, jasa ekonomi dan sektor-sektor ekonomi lainnya.
 - f. Promosi dan pemasaran produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan TKI di Negara Penerima.
 - g. Promosi dan peningkatan kerja sama keuangan dan pembangunan, kerja sama teknik, ilmu pengetahuan, dan alih teknologi dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
 - h. Penyiapan dan pembuatan perjanjian internasional.
 - i. Penyebarluasan informasi mengenai situasi dan perkembangan ekonomi Indonesia di berbagai forum melalui berbagai program dan kegiatan.
 - j. Pelaksanaan kunjungan kerja ke berbagai sentra industri dan perdagangan, baik di negara penerima maupun di Indonesia dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi.
 - k. Penyiapan pembentukan dan pelaksanaan Komisi Bersama antara Indonesia dengan Negara Penerima.
 - l. Pelaksanaan survei pasar, pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk negara pesaing untuk penerobosan, dan penetrasi pasar di Negara Penerima.
 - m. Pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha di Negara Penerima.
 - n. Pengupayaan penghapusan hambatan non tarif terhadap produk-produk ekspor Indonesia di Negara Penerima.
 - o. Fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, dan investasi.
 - p. Pengidentifikasian jumlah mata dagang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan jumlah importir di Negara Penerima.
 - q. Pembinaan hubungan dengan para investor dan importir dari Negara Penerima.
 - r. Pengamatan, pengumpulan data perkembangan ekonomi, analisa, pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi di Negara Penerima yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional, khususnya di bidang ekonomi dan penyampaian rekomendasi ke Pemerintah Pusat.

- s. Fasilitasi dan penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan ekonomi di berbagai forum untuk menjelaskan dan menyebarkan informasi mengenai situasi dan perkembangan ekonomi Indonesia.
 - t. Penyebarluasan informasi dan data mengenai indikator-indikator ekonomi, peluang potensi bisnis Indonesia di berbagai forum, melalui media cetak, elektronik, dan website.
 - u. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi-fungsi Atase Teknis terkait.
 - v. Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat sebagai bahan masukan bagi peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi antara Indonesia dengan Negara Penerima.
 - w. Pelaksanaan misi khusus atau misi lain yang ditugaskan oleh pemerintah RI dan/atau Kepala Perwakilan RI.
3. Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan RI dalam menjalin dan meningkatkan hubungan, kerja sama, promosi sosial dan budaya antara Indonesia dan Kuwait. Dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan tugas sebagai berikut:
- a. Peningkatan hubungan dan kerja sama bilateral, regional dan multilateral.
 - b. Perwakilan pemerintah RI dalam memperjuangkan kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
 - c. Perwakilan pemerintah RI dalam berbagai forum bilateral, regional dan multilateral.
 - d. Pengembangan jejaring dan negosiasi dengan berbagai pihak meliputi kalangan pemerintah, akademisi, media massa dan organisasi/lembaga non pemerintah mengenai kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
 - e. Internasional.
 - f. Pengembangan rencana dan taktik pembentukan opini publik dan dukungan media massa di Negara Penerima untuk mendukung diplomasi Indonesia, terutama berkaitan dengan pemulihan kepercayaan dan citra Indonesia.
 - g. Pelayanan multimedia pada saat kunjungan para pejabat tinggi Indonesia di Negara Penerima.
 - h. Penjelasan dan pengamanan kebijakan luar negeri Indonesia agar dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah pengertian di kalangan pemerintah, pers, dan masyarakat di Negara Penerima.
 - i. Pelaksanaan program pertukaran pelajar/mahasiswa, misi kesenian dan budaya antara Indonesia dan Negara Penerima.
 - j. Penafsiran dan penegasan posisi Indonesia untuk membangun pemahaman dan dukungan publik di negara penerima terhadap kebijakan politik Indonesia.
 - k. Pendekatan kepada kelompok-kelompok masyarakat, lembaga persahabatan, perhimpunan mahasiswa/pelajar Indonesia, dan media massa di Negara Penerima.
 - l. Promosi dan peningkatan intensitas hubungan dan kerja sama sosial, budaya, dan pendidikan antara Indonesia dengan Negara Penerima melalui penyelenggaraan program-program pendidikan, kebudayaan, dan misi-misi kesenian Indonesia.
 - m. Promosi dan peningkatan upaya-upaya penyebaran informasi dan nilai-nilai budaya Indonesia di Negara Penerima baik melalui media cetak maupun elektronik.
 - n. Pelaksanaan kunjungan kerja ke berbagai kantor media massa di negara penerima untuk menjelaskan berbagai langkah kebijakan yang diambil pemerintah RI.
 - o. Pengelolaan dan pengembangan situs dan internet di Perwakilan RI.
 - p. Penyusunan dan pengelolaan basis data tentang media massa di negara penerima.

- q. Fasilitasi kunjungan jurnalis, kalangan perfilman, dan penulis perjalanan wisata (*travel writers*) dari Negara Penerima ke Indonesia dan sebaliknya.
 - r. Penyiapan dan pembuatan perjanjian internasional.
 - s. Pengamatan, analisa, dan pelaporan perkembangan sosial budaya di Negara Penerima yang berkaitan dan/atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat.
 - t. Penyebarluasan informasi mengenai situasi dan perkembangan Indonesia di berbagai forum melalui berbagai program dan kegiatan.
 - u. Pelaksanaan kunjungan kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat Indonesia dan peningkatan kerja sama sosial budaya dengan negara penerima.
 - v. Penyiapan pembentukan dan pelaksanaan Komisi Bersama antara Indonesia dengan Negara Penerima.
 - w. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi-fungsi Atase Teknis terkait.
 - x. Pelaksanaan misi khusus atau misi lain yang ditugaskan oleh pemerintah RI dan/atau Kepala Perwakilan RI.
4. Fungsi Protokol dan Konsuler mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan RI dalam melaksanakan fungsi protokoler dan layanan kekonsuleran, yaitu:
- a. Fungsi Protokol mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan keprotokolan dan mengatur acara-acara resmi di Perwakilan.
 - b. Fungsi Konsuler mempunyai peran dalam memberikan pelayanan notariat, kehakiman dan jasa kekonsuleran serta perlindungan bagi WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di Kuwait.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan tugas sebagai berikut.

4.1 Fungsi Protokol:

- a. Pengaturan kunjungan kenegaraan resmi.
- b. Pengaturan tata urutan (*preseance*) dalam acara-acara resmi dan acara Perwakilan.
- c. Pengaturan penyerahan surat-surat kepercayaan (*credentials*) Kepala Perwakilan.
- d. Pengaturan teknis pertemuan Kepala Perwakilan/pejabat tinggi RI dengan pejabat pemerintah Negara Penerima.
- e. Penyampaian nota-nota diplomatik mengenai kedatangan dan kepulangan Home Staff kepada pemerintah Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
- f. Pengaturan courtesy call Kepala Perwakilan.
- g. Pengaturan pemberian fasilitas bagi staf dan misi diplomatik berupa hak-hak istimewa/kekebalan/asas timbal balik.
- h. Pengembangan dan peningkatan jejaring kerja dengan pejabat protokol di berbagai lembaga pemerintah di Negara Penerima.
- i. Pengaturan upacara bendera dan resepsi peringatan HUT RI dan hari-hari nasional lainnya.
- j. Tugas-tugas keprotokolan lainnya.

4.2 Fungsi Konsuler:

- a. Pemberian pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum kepada WNI termasuk TKI dan BHI dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional

dengan memperhatikan hukum setempat serta hukum dan kebiasaan internasional.

- b. Penanganan pengaduan tentang permasalahan yang dihadapi oleh PMI dengan pengguna jasa dan/atau dengan pemerintah setempat.
- c. Pengidentifikasian masalah-masalah yang dihadapi PMI dan pelayanan konsultasi dan informasi masalah-masalah kekonsuleran.
- d. Pemberian nasihat dan pengupayaan bantuan hukum dalam hal terjadi sengketa perburuhan antara pengguna jasa dengan PMI, perusahaan pengerah jasa PMI (P3MI) dan perusahaan pengerah jasa tenaga kerja asing, pemerintah setempat maupun sesama PMI.
- e. Pendataan secara komprehensif terhadap WNI yang berada di Negara Penerima.
- f. Penerimaan, pencatatan, penelitian lapor diri, pengurusan ketenagakerjaan, dan pengesahan dokumen-dokumen ketenagakerjaan termasuk kontrak kerja sama dan kontrak kerja.
- g. Pelaksanaan fungsi kenotariatan dan pencatatan sipil yang meliputi: legalisasi dokumen-dokumen nasional yang akan dipakai di Negara Penerima dan sebaliknya, penerbitan Surat Keterangan Kelahiran, mengetahui keabsahan dokumen pengangkatan anak, penerbitan Surat Keterangan Kematian, dan penyampaian dokumen-dokumen pengadilan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- h. Pengurusan masalah pewarganegaraan (naturalisasi), repatriasi, deportasi, penyelesaian masalah pelintas batas ilegal, masalah penyelundupan dan perdagangan manusia serta obat-obatan terlarang, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, WNI terlantar, dan evakuasi.
- i. Pelayanan pengeluaran paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), surat keterangan penduduk luar negeri, pemberian visa dan keimigrasian lainnya.
- j. Pengurusan perizinan (*clearance*) melintas atau mendarat pesawat udara maupun kapal laut.
- k. Bertindak sebagai wakil dari Perwakilan RI dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perwakilan RI.
- l. Pengembangan dan peningkatan jejaring kerja dengan berbagai pihak, terutama dengan kalangan pemerintah dan swasta, termasuk kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, otoritas pelabuhan, perusahaan penerbangan, perbankan, perhotelan, masyarakat setempat, dan WNI di Negara Penerima.
- m. Pengamatan, analisa, dan pelaporan sistem serta perkembangan hukum setempat, agar dapat diupayakan pemberian informasi yang cepat dan akurat bagi WNI dan/atau BHI di Negara Penerima.
- n. Pelaksanaan kunjungan kerja untuk memberikan penyuluhan hukum dan masalah kekonsuleran kepada WNI, asosiasi masyarakat Indonesia dan/atau perkumpulan pelajar/mahasiswa Indonesia di Negara Penerima.
- o. Penyiapan dan pembuatan perjanjian internasional.
- p. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi-fungsi Atase Teknis terkait.
- q. Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kekonsuleran.

- r. Peningkatan persatuan dan kesatuan serta kerukunan antara sesama WNI di Negara Penerima.
5. Fungsi Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 3551/B/KP/08/2017/Tahun 2017 tertanggal 22 Agustus 2017 perihal Penempatan Atase Tenaga Kerja pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait City, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, menjalankan tugas dan fungsi:
- a. Monitoring Legalisasi PKP antara PPTKIS dengan Mitra Usaha atau Pengguna, PP antara PPTKIS dengan CTKI dan PK antara PMI dengan Pengguna;
 - b. Verifikasi, Penilaian dan Legalisasi Dokumen Ketenagakerjaan
 - c. Perluasan Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja
 - d. Fasilitasi dan Mediasi penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PMI dan Pengguna di negara penempatan
 - e. Fasilitasi advokasi kepada PMI berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara penempatan
 - f. Pendataan kedatangan dan keberadaan PMI selama di negara penempatan serta kepulangan PMI ke tanah air
 - g. Penyusunan data dan informasi Mitra Usaha dan Pengguna Jasa PMI di negara penempatan
 - h. Pemantauan keberadaan perwakilan P3MI di negara penempatan
 - i. Koordinasi dengan instansi teknis terkait di negara penempatan sesuai misi perwakilan
 - j. Sosialisasi dan desiminasi kebijakan ketenagakerjaan kepada PMI dan para pemangku kepentingan di negara penempatan
 - k. Pelayanan kepada calon tenaga kerja negara penempatan (TKA) yang akan bekerja di Indonesia.
6. Fungsi Komunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan RI dalam menyelenggarakan kegiatan Komunikasi Pemberitaan dan pengamanannya serta pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Perwakilan.
7. Fungsi Administrasi dan Ketatausahaan mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan RI dalam menyelenggarakan fungsi ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan perlengkapan, pemberian dukungan umum dan logistik bagi pelaksanaan tugas perwakilan, serta pengelolaan dan pemeliharaan barang milik Negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, dibantu oleh Kepala Kanselera (Head of Chancery) dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unsur pelaksana dan penanggung jawab tugas administrasi dan kerumahtanggaan, serta Bendaharawan dan Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan Perwakilan (BPKRT) yang bertugas membantu Kepala Kanselera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan.

I.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

KBRI Kuwait City merupakan salah satu perwakilan yang cukup strategis dan penting di Timur Tengah. Indonesia dan Kuwait memegang prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing dan berusaha menyelesaikan perselisihan internasional secara damai, adil dan bermartabat. Seperti halnya Indonesia, negara Kuwait aktif memainkan peran, baik di tingkat regional maupun global khususnya melalui lembaga-lembaga di bawah PBB, GCC, dan OKI.

Kuwait memiliki posisi penting yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Secara politis, Kuwait berperan aktif di Kawasan dan di fora internasional. Sebagai negara kaya dengan cadangan minyak jangka panjang serta luasnya peluang kerja, Kuwait patut dijadikan destinasi ekspor, outbound investment dan pekerja migran terampil Indonesia. Di lain sisi, potensi investasi dan pariwisata dari Kuwait juga masih menjadi tantangan untuk dioptimalkan.

I.2.1. Potensi/Peran Strategis

Politik

Hubungan diplomatik Indonesia dan Kuwait secara resmi dibuka pada tanggal 28 Februari 1968. Kebijakan politik luar negeri Kuwait difokuskan kepada negara-negara Teluk (GCC) yaitu Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Oman, dan Bahrain. Disamping itu, terdapat partner yang dinilai strategis oleh Kuwait yaitu 2 negara tetangga langsung (Iran dan Irak) serta 5 negara anggota Tetap DK PBB.

Kondisi politik dalam negeri di Kuwait cukup dinamis, peran dan kewenangan Parlemen Kuwait yang cukup besar seringkali mengakibatkan terjadinya reshuffle Kabinet bahkan penggantian Perdana Menteri. Kondisi tersebut secara umum tidak terlalu mengganggu roda birokrasi dan tidak menimbulkan gejolak yang besar di lapangan, namun dalam pelaksanaan hubungan diplomasi, hal tersebut memberikan hambatan tersendiri.

Di antara ongoing process pada pelaksanaan hubungan bilateral politik RI – Kuwait yang terkendala antara lain: rencana pelaksanaan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-2 dan rencana penandatanganan *Letter of Intent* kerja sama Pertahanan antara Kemhan RI dan Kemhan Kuwait.

Pada 20 Desember 2023, Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber secara resmi dinobatkan sebagai Emir Kuwait, menggantikan Emir Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah yang meninggal dunia pada 16 Desember 2023. Reformasi di tingkat negara dan parlemen menandai tiga tahun kepemimpinan almarhum Sheikh Nawaf, yang berhasil menciptakan rasa persatuan di seluruh spektrum Masyarakat Kuwait.

Ekonomi

Di sektor ekonomi, Sheikh Nawaf telah meletakkan pondasi ekonomi yang kuat, termasuk meluncurkan beberapa mega proyek pembangunan untuk mencapai visi Kuwait 2035. Proyek tersebut antara lain di sektor migas dan investasi serta berbagai kebijakan diversifikasi ekonomi untuk menjaga ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan negara terhadap minyak.

Pemulihan ekonomi Kuwait pasca pandemi 2020 tidak terganggu dengan dampak perang Rusia – Ukraina, karena hubungan perdagangan dan keuangan Kuwait dengan kedua negara tersebut tidak terlalu signifikan. Dengan mengambil manfaat dari produksi dan harga minyak yang tinggi serta pertumbuhan non-PDB yang stabil, pemulihan ekonomi Kuwait terus berlanjut. Inflasi dalam negeri terkendali, sementara keseimbangan fiskal dan eksternal juga semakin menguat, sehingga stabilitas keuangan negara tetap terjaga.

Kuwait menyimpan potensi besar yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Secara politis, Kuwait berperan aktif di Kawasan dan di fora internasional. Sebagai negara yang kaya dengan cadangan minyak jangka Panjang, serta luasnya peluang kerja, Kuwait patut dijadikan destinasi ekspor, *outbound investment* dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di sektor formal. Di lain sisi, potensi investasi dan pariwisata dari Kuwait juga masih menjadi tantangan untuk dioptimalkan.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, meskipun tren total perdagangan antara Indonesia – Kuwait mengalami penurunan 7,09% dalam lima tahun terakhir (2018-2022), total perdagangan per bulan November 2023 mengalami peningkatan 58,61% (yoy). Pada periode yang sama, ekspor Indonesia ke Kuwait mengalami peningkatan 48,11% (yoy), sementara impor Indonesia dari Kuwait meningkat 71,34% (yoy). Tingginya angka impor ini dikarenakan tingginya impor Indonesia pada sektor migas.

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Trend (%) 18- 22	Jan-Nov		Perub (%) 23/22
							2022	2023	
Total Perdagangan	403.6	504.8	440.8	395.5	315.8	-7.09	286.2	454	58.61
Migas	214.1	278.6	236.2	231.6	103.2	-15.16	89.4	176.5	97.39
Non Migas	189.6	226.2	204.6	163.8	212.6	-0.93	196.8	277.4	40.99
Ekspor	137	196.5	149	128.7	171.5	0.25	156.8	232.3	48.11
Migas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non Migas	137	196.5	149	128.7	171.5	0.25	156.8	232.3	48.12
Impor	266.6	308.3	291.9	266.8	144.3	-12.82	129.4	221.7	71.34
Migas	214.1	278.6	236.2	231.6	103.2	-15.16	89.4	176.5	97.4
Non Migas	52.5	29.7	55.7	35.2	41.2	-3.13	39.9	45.1	13
Neraca Perdagangan	-129.6	-111.7	-142.9	-138.1	27.1	0	27.5	10.6	-61.34
Migas	-214.1	-278.6	-236.2	-231.6	-103.2	15.16	-89.4	-176.5	-97.4
Non Migas	84.5	166.9	93.3	93.5	130.3	2.91	116.9	187.2	60.11

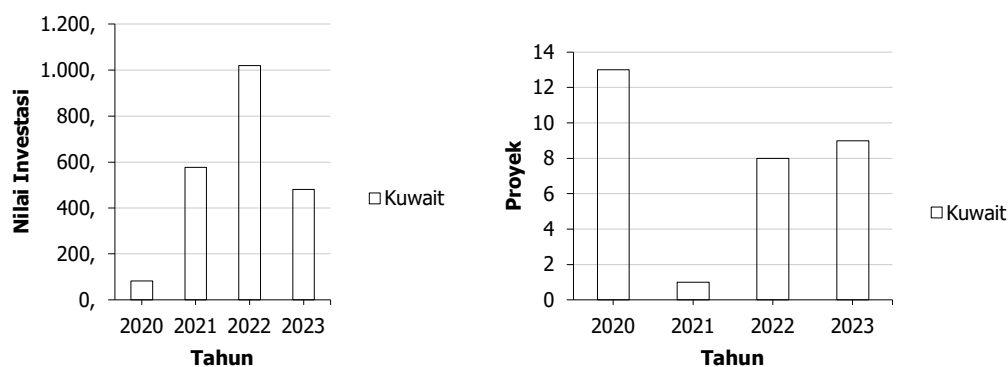
(tabel 2)

Di bidang investasi, kerja sama kedua negara relatif stabil dan memiliki banyak potensi yang dapat dioptimalkan. Investasi Kuwait di Indonesia masih didominasi oleh sektor migas. Berdasarkan dari Kementerian Investasi RI, pada tahun 2023 investasi Kuwait di Indonesia per Q3 berjumlah USD 480,5ribu. Meliputi 9 (sembilan) proyek kategori: pertambangan (1 proyek), hotel dan restaurant (3 proyek), perumahan, industri dan perkantoran (3 proyek) dan jasa lainnya (2 proyek), dengan titik lokasi di Jakarta, Banten, Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Jumlah nilai investasi di tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan nilai investasi di tahun 2022 yang mencapai USD 1,01 juta, namun jumlah proyek investasi bertambah dari 8 proyek (2022) menjadi 9 proyek (2023).

*Dalam ribu USD

		2020		2021		2022		2023	
		Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)
Sektor Primer	Pertambangan	-	-	-	-	-	-	1	0.9
	Total Sektor Primer	-	-	-	-	-	-	1	0.9
Sektor Tersier	Konstruksi	6	0.0	-	-	-	-	-	-
	Hotel dan Restoran					3	0.0	3	0.0
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	7	83.2	1	576.4	3	985.6	3	474.3
	Jasa Lainnya					2	32.9	2	5.3
	Total Sektor Tersier	13	83.2	1	576.4	8	1,018.5	8	479.6
	Total Kuwait	13	83.2	1	576.4	8	1,018.5	9	480.5
Total		13	83.2	1	576.4	8	1,018.5	9	480.5

(tabel 3)



(tabel 4)

Budaya dan Pariwisata

Sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, KBRI telah melakukan pembinaan kepada WNI sebagai langkah untuk memperkuat jaringan informasi penting dan mendukung upaya promosi citra positif Indonesia. Sepanjang 2023, beberapa diantaranya bekerja sama dengan Forum Diaspora Indonesia di Kuwait (FDIK), KBRI mengadakan berbagai kegiatan pertandingan olah raga, perayaan hari raya, kegiatan-kegiatan sosial, fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan, webinar dalam rangka hari ibu, serta perlombaan menyambut HUT RI ke-78.

Di bidang Pariwisata, kunjungan wisatawan asal Kuwait ke Indonesia di tahun 2023 dinilai meningkat secara pesat. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan dan pariwisata Indonesia yang dilakukan oleh KBRI Kuwait City, serta berkembangnya sektor pariwisata di tanah air.

Perlindungan WNI dan Pelayanan Kekonsuleran

Di bidang **perlindungan**, Selama tahun 2023, KBRI Kuwait City telah menangani 162 kasus WNI yang terdiri dari 161 kasus biasa dan 1 kasus luar biasa. Penanganan kasus WNI oleh KBRI Kuwait City telah mencapai persentase 99,72%. KBRI Kuwait City juga telah memfasilitasi 95 orang WNI di shelter perlindungan KBRI.

Berdasarkan data Otoritas Imigrasi setempat, tercatat 6.164 WNI di wilayah akreditasi KBRI Kuwait City. Pelayanan **kekonsuleran** KBRI Kuwait City dibuka pada hari Minggu – Kamis pada pukul 08.30 – 16.30 waktu Kuwait. Layanan *hotline* KBRI Kuwait City siaga selama 24/7 dan dikelola oleh staff Kekonsuleran KBRI. Sepanjang tahun 2023, KBRI Kuwait City telah mengeluarkan 3.312 dokumen kekonsuleran.

Dalam rangka melakukan upaya untuk memastikan akurasi data dan layanan yang menjangkau seluruh WNI di Kuwait. KBRI Kuwait City telah melakukan kegiatan jemput bola berupa warung kekonsuleran dan sosialisasi terkait informasi-informasi kekonsuleran serta himbauan bagi para WNI di Kuwait untuk melakukan lapor diri pada halaman <https://peduliwni.kemlu.go.id>.

Dalam Bidang Ketenagakerjaan Indonesia memiliki Memorandum of Understanding dengan Kuwait tentang Penempatan Tenaga Kerja yang ditandatangani pada tahun 1996. Ini merupakan landasan hukum dan bukti hubungan baik dalam menempatkan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Kuwait. Selama tahun 2023 KBRI Kuwait city berhasil memperoleh 3.805 lowongan pekerjaan untuk PMI dan 606 kontrak kerja yang telah dilegalisasi oleh KBRI.

Unsur Penunjang

Selain bidang utama tersebut di atas, pelaksanaan **tusi unsur penunjang** KBRI Kuwait berjalan dengan cukup baik. Unsur penunjang membantu pelaksanaan tusi perwakilan dengan adanya penyesuaian dan realokasi anggaran, serta peningkatan sistem keamanan baik premis dan keamanan siber di lingkungan KBRI Kuwait City.

1.2.2. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Pada prinsipnya, secara umum pelaksanaan kegiatan diplomasi Indonesia di Negara Kuwait dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan yang berarti. Meskipun demikian, pada semester IV tahun 2023, pelaksanaan beberapa kegiatan yang bersifat hiburan/musik/kesenian sempat dilarang oleh Pemerintah Kuwait dalam rangka aksi solidaritas pada tragedi yang terjadi di Palestina, serta masa berkabung atas meninggalnya mendiang Amir Kuwait, Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah Nawaf.

Tantangan dan hambatan perdagangan tentu saja masih dihadapi, antara lain kendala terbatasnya jalur dan transportasi dari Indonesia, kekurangan persediaan bahan baku, dan tingginya biaya produksi dan biaya pengiriman yang mengakibatkan kompetisi harga yang susah disepakati. Terkait ekspor dan impor, nilai impor Indonesia dari Kuwait masih dinilai tinggi jika dibandingkan dengan nilai ekspor Indonesia ke Kuwait. Hal ini dikarenakan besarnya impor sektor migas Indonesia dari Kuwait.

Untuk bidang investasi, Kuwait cenderung menyukai investasi *brownfield*. KBRI Kuwait City terus berupaya meningkatkan investasi inbound dari Kuwait ke Indonesia dengan mempromosikan berbagai proyek investasi potensial di Indonesia kepada mitra-mitra terkait di Kuwait.

Walaupun sejak tahun 2015 Pemerintah Indonesia telah menerapkan moratorium pengiriman PMI sektor domestik ke wilayah Timur Tengah, termasuk Kuwait, hingga saat ini masih terdapat beberapa kasus WNI sektor domestik yang merupakan residu dari penerapan

moratorium. KBRI Kuwait City memantau beberapa WNI sektor domestik masih tetap tinggal di Kuwait dengan izin tinggal yang sudah tidak berlaku (*overstayer*) dan sudah tidak bekerja pada majikannya. WNI tersebut biasanya akan mencari pekerjaan yang bersifat 'serabutan' dan/atau membeli visa ilegal untuk memperpanjang izin tinggal mereka di Kuwait.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

III.1. Rencana Strategis KBRI Kuwait City Tahun 2020-2024

Dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 28/B/RO/XI/2020/01 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri tahun 2020-2024 yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana akan dituangkan pada Renstra KBRI Kuwait City tahun 2020-2024, sebagai berikut:

VISI DAN MISI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

VISI

“Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

MISI

1. Memberikan nilai manfaat ekonomi yang optimal melalui hubungan luar negeri untuk mendukung struktur ekonomi yang produktif, mandiri, berdaya saing.
2. Memberikan perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang prima sebagai upaya perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
3. Menjaga integritas NKRI yang bersinergi bersama dengan Pemerintah Pusat serta Daerah dan meningkatkan citra positif Indonesia di dunia Internasional.
4. Memajukan kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di dunia Internasional.
5. Meningkatkan infrastruktur diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia.

VISI DAN MISI KBRI KUWAIT CITY

Guna mewujudkan visi KBRI Kuwait tahun 2020-2024 yang sejalan dengan visi Kementerian Luar Negeri, maka ditetapkan pernyataan visi KBRI Kuwait sebagai berikut:

VISI

“Menjadi ujung tombak dalam mewujudkan wibawa diplomasi Indonesia di Kuwait: Meraih peluang dengan mengubah citra Indonesia dari isu pembantu rumah tangga ke isu ekonomi”

Menjadikan KBRI Kuwait sebagai garda terdepan dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri RI yang diabdikan kepada kepentingan nasional sejalan dengan visi Kementerian Luar Negeri. KBRI Kuwait berupaya semaksimal mungkin untuk meraih peluang akan potensi ekonomi Kuwait untuk kepentingan nasional Indonesia.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, KBRI Kuwait telah menetapkan 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024, sejalan dengan misi Kementerian Luar Negeri dalam mendukung pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memperkuat kelembagaan KBRI Kuwait untuk menghadapi tantangan baru.
- b. Membangun jejaring kemitraan yang luas dan kuat dengan berbagai pemangku kepentingan di Kuwait, sebagai landasan untuk menciptakan *Quantum Leap* dalam hubungan bilateral di segala bidang melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi hubungan bilateral kedua negara.
- c. Membangun sistem perlindungan WNI secara kuat melalui penataan kembali sistem penempatan PMI profesional.

II.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Merujuk Peraturan Menteri Luar Negeri no. 4/2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, KBRI Kuwait melakukan penyesuaian dokumen perencanaan dan pelaporan. Penyesuaian Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama KBRI Kuwait Tahun 2022 telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perwakilan RI 2022.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen Duta Besar RI Kuwait sebagai penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan Menteri Luar Negeri sebagai pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI KUWAIT CITY
PETA STRATEGI PERWAKILAN RI KUWAIT CITY TAHUN 2023

(Gambar 1)

c	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stakeholders Perspective				
S.1	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Kuwait City yang Optimal	IKU S.1.1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	85%
		SUB IKU 1	Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	4
		SUB IKU 2	Nilai perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	USD 140.000.000

		IKU S.1.2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	94%
		SUB IKU 1	Jumlah komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	1
		SUB IKU 2	Nilai investasi dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	USD 650.000
		IKU S.1.3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	94,08%
		SUB IKU 1	Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Kuwait City ke Indonesia	76%
		SUB IKU 2	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Kuwait City ke Indonesia	1800 kunjungan
S.2	Citra positif Indonesia di negara akreditasi KBRI Kuwait City yang meningkat	IKU S.2.1	Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Kuwait City	3,95 (skala 5)
Customer Perspective				
C.1	Pelindungan WNI dan pelayanan publik KBRI Kuwait City yang prima	IKU C.1.1	Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Kuwait City yang diselesaikan	83%

		IKU C.1.2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Kuwait City	4 (Skala 4)
		IKU C.1.3	Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI KBRI Kuwait City	4 (Skala 4)
C.2	Dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di negara akreditasi KBRI Kuwait City	IKU C.2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	80%

Internal Business Process Perspective

B.1	Diplomasi bilateral di negara akreditasi KBRI Kuwait City yang kuat	IKU B.1.1	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	1
		IKU B.1.2	Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	1
		IKU B.1.3	Indeks Respon Positif terhadap informasi data Economic Intelligence/Market Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Kuwait City	5 (skala 5)
B.2	Basis data KBRI Kuwait City yang akurat	IKU B.2.1	Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Kuwait City yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	90%

Learning and Growth Perspective

L1	Tata kelola organisasi KBRI Kuwait City yang baik	IKU L.1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Kuwait City	79 (BB)
L2	Pengelolaan aset KBRI Kuwait City yang optimal	IKU L.2.1	Indeks Pengelolaan Aset KBRI Kuwait City	2,9 (Skala 4)
L3	Pengelolaan anggaran KBRI Kuwait City yang optimal dan akuntabel	IKU L.3.1	Nilai Kinerja Anggaran KBRI Kuwait City	90

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Sebagai implementasi dari Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KBRI Kuwait City yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, telah diperoleh hasil dari penghitungan realisasi kinerja KBRI Kuwait pada aplikasi e-kinerja KBRI Kuwait. Data lengkap hasil capaian kinerja KBRI Kuwait tahun 2023 dapat diakses melalui <https://e-kinerja.kemlu.go.id>.

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) KBRI Kuwait City untuk tahun 2023 berdasarkan pada aplikasi Kinerja Kemlu (AKSI) mencapai 102,65, dengan rincian nilai-nilai perspektif pembentuk sebagai berikut:

Perspektif	Bobot Perspektif	Skor Perspektif
<i>Stakeholder Perspective</i>	25%	109,88
<i>Customer Perspective</i>	15%	113,33
<i>Internal Business Process Perspective</i>	30%	95,91
<i>Learning and Growth Perspective</i>	30%	98,04
Total NCKO	102,65	

(Tabel 5)

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) KBRI Kuwait City untuk tahun 2023 berdasarkan pada capaian kinerja per IKU adalah sebagai berikut:

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023	Realisasi	Capaian
(3)	(4)	(5)		
IKU S.1.1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	85%	167,29	196,81
SUB IKU 1	Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	4	4	100
SUB IKU 2	Nilai perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	USD 140.000.000	USD 454.000.000	324,29

IKU S.1.2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	94%	156,73	-
SUB IKU 1	Jumlah komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	1	2	200
SUB IKU 2	Nilai investasi dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	USD 650.000	USD 362.500	55,77
IKU S.1.3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	94,08%	102,24%	108,67
SUB IKU 1	Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Kuwait City ke Indonesia	76%	100%	131,58
SUB IKU 2	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Kuwait City ke Indonesia	1800 kunjungan	4.692 kunjungan	260,67
IKU S.2.1	Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Kuwait City	3,95 (skala 5)	4,09 (skala 5)	103,54
IKU C.1.1	Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Kuwait City yang diselesaikan	83%	99,72%	120,14
IKU C.1.2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Kuwait City	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	100
IKU C.1.3	Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI KBRI Kuwait City	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	100

IKU C.2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	80%	100%	125
IKU B.1.1	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	1	1	100
IKU B.1.2	Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	1	1	100
IKU B.1.3	Indeks Respon Positif terhadap informasi data Economic Intelligence/Market Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Kuwait City	5 (skala 5)	5 (skala 5)	100
IKU B.2.1	Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Kuwait City yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	90%	82,64%	91,83
IKU L.1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Kuwait City	79 (BB)	76,55 (BB)	96,90
IKU L.2.1	Indeks Pengelolaan Aset KBRI Kuwait City	2,9 (Skala 4)	2,9 (Skala 4)	100
IKU L.3.1	Nilai Kinerja Anggaran KBRI Kuwait City	90	87,51	97,23

Stakeholder Perspective

S1 Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Kuwait City yang Optimal

Sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Perwakilan RI serta amanat kinerja dari Presiden RI, capaian kinerja diplomasi ekonomi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan, investasi, dan wisatawan mancanegara. Hal ini ditujukan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air.

Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal merupakan jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang paling menguntungkan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara.

Sasaran Strategis (SS) S1 diukur berdasarkan capaian pada 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perhitungan capaian pada tiap IKU merujuk pada realisasi SUB IKU masing-masing, dengan rincian sebagai berikut:

1. IKU S1.1: Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan, yang capaiannya merupakan agregat capaian SUB IKU:
 - a. Jumlah Komitmen Perdagangan.
 - b. Nilai Perdagangan Dengan Negara Mitra.
2. IKU S1.2: Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi, yang capaiannya merupakan agregat capaian SUB IKU:
 - a. Jumlah Komitmen Investasi.
 - b. Nilai Investasi Dengan Negara Mitra.
3. IKU S1.3: Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata, yang capaiannya merupakan agregat capaian SUB IKU:
 - a. Tingkat Potensi Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia.
 - b. Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia.

Analisis IKU S1.1

Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City

Deskripsi IKU

IKU S1.1 sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. IKU ini secara spesifik mengukur value yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk perdagangan.

IKU ini memiliki 2 SUB IKU, yakni:

1. SUB IKU-1: Jumlah komitmen perdagangan, dengan bobot 70%

SUB IKU ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis antara Indonesia dengan negara mitra yang memuat nilai perdagangan. Komitmen diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut perdagangan, seperti *business matching*, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi dagang, dan forum kerja sama. Jumlah komitmen perdagangan dihitung dari perolehan komitmen baru yang difasilitasi oleh KBRI Kuwait City dari Januari-Desember tahun berjalan.

SUB IKU-1 di bobotkan sebesar 70% karena pelaksanaan promosi dan fasilitasi proses pembentukan komitmen perdagangan merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Kemenlu.

2. SUB IKU 2: Nilai perdagangan dengan negara mitra, dengan bobot 30%

SUB IKU ini mengukur nilai perdagangan berupa ekspor yang terealisasi (dalam mata uang USD) dengan suatu negara akreditasi. Realisasi dari nilai perdagangan bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi SUB IKU 2 adalah perolehan nilai perdagangan dari Januari - Oktober tahun berjalan.

Sub IKU 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian SUB IKU dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenlu namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, dunia usaha, dll).

Informasi Kinerja

Tabel III.x
Capaian IKU S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City yang Optimal

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City yang Optimal	Capaian SUB IKU 1 : Jumlah komitmen perdagangan (70%)	100
	Capaian SUB IKU 2 : Nilai perdagangan dengan negara mitra (30%)	324,29
Realisasi		167,29
Target		85
Capaian		196,81
Batas Toleransi (<i>opsional jika capaian melebihi 120%</i>)		120

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2023, realisasi IKU S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City yang Optimal adalah sebesar 167,29 dari target sebesar 85, sehingga capaian IKU sebesar 196,81 dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Realisasi IKU S1.1 diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian SUB IKU 1 dan SUB IKU 2. Pada tahun 2023, realisasi SUB IKU 1 Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City adalah sebesar 4 dari target sebesar 4, sehingga capaian IKU sebesar 100% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Perolehan komitmen perdagangan berasal dari berbagai sektor, yaitu pada (i) sektor makanan dan minuman (F&B) terdapat *World Sweet Central Company* (WSCC) untuk impor produk makanan Indonesia lainnya selain produk Recheese Nabati, (ii) kontrak kerja sama antara PT Banglele Indonesia Maju (BMI) dan Cross Border Company (CBC) untuk pemasaran produk-produk Indonesia di Kuwait, (iii) peninjauan PT Gonusa Prima dengan Al Thiqa Group Company (TGC) untuk produk kopi kemasan, (iv) serta peninjauan di sektor industri kertas antara Kuwait Paper Industry (KPI) dan PT Kiat Indah Pulp dan Paper Indonesia untuk pembelian 25 ton bahan baku kertas.

Realisasi SUB IKU 2 Nilai perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City adalah sebesar USD 450.000.000 dari target sebesar USD 140.000.000 sehingga capaian IKU sebesar 324,29 dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.x

Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City yang Optimal

IKU	2022			2023		
	T	R	C	T	R	C
S1.1	85%	120%	120%	85% ↑	167,29 ↑	196,81%
SUB IKU 1	4	5	120%	4	4	100%
SUB IKU 2	USD 450 ribu	USD 140,2 juta	120%	USD 140 juta	USD 454 juta	324,29

IKU S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City yang Optimal ini diadopsi pada tahun 2022 setelah dilakukan evaluasi dan ditajamkan kembali sehingga dapat mengukur proses diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh KBRI Kuwait City Untuk itu capaian IKU di tahun 2023 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, target SUB IKU 1 tahun 2023 masih sama dengan target pada tahun 2022, yaitu 85%. Penetapan target yang sama ini disebabkan oleh masih adanya ketidakpastian pasar pasca pandemi Covid-19. Realisasi SUB IKU 1 pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yaitu 100% dengan capaian 4 komitmen dari target yang telah ditetapkan yaitu 4 komitmen perdagangan

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, target SUB IKU 2 mengalami peningkatan target menjadi USD 140.000.000 dari USD 450.000 pada tahun 2022. Peningkatan target ini disebabkan oleh tingginya nilai perdagangan antara kedua negara yang dicapai pada tahun 2022, sehingga terdapat penyesuaian target pada tahun 2023 dengan realisasi pada tahun 2022. Sedangkan untuk realisasi SUB IKU 2 mengalami peningkatan menjadi USD 454.000.000 dari USD 140.000.000 pada tahun 2022.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh beberapa *flagship programs* KBRI Kuwait City di sektor perdagangan sesuai PK 2023 yang telah disesuaikan dengan *refocussing* yang telah dilaksanakan. Selama tahun berjalan, KBRI Kuwait City terus berkontribusi aktif dalam memperkenalkan potensi produk-produk Indonesia di pasar Kuwait dan mencoba membuka akses pasar melalui *stakeholders* terkait di Kuwait dengan berbagai cara, yaitu promosi perdagangan dengan cara menjalin *networking* dan berkunjung ke perusahaan setempat, partisipasi pada pameran/festival dagang, memfasilitasi *business matching* antar pengusaha di kedua negara baik secara daring maupun luring, serta menyelenggarakan kegiatan Indonesia Trade and Tourism Forum and Exhibition untuk menjadi wadah bagi pengusaha dari kedua negara.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, kami menilai bahwa faktor sosial juga memiliki peran penting dalam hal mengenalkan produk-produk Indonesia dan mempromosikan potensi produk-produk Indonesia kepada Masyarakat Kuwait. Keberadaan WNI di berbagai sektor di Kuwait dan Citra Positif Indonesia di mata Masyarakat di wilayah akreditasi KBRI Kuwait City mempermudah akses produk Indonesia untuk lebih dikenal luar di pasar Kuwait.

Kendala dan Tantangan

- a. Secara umum, yang menjadi tantangan dalam hal menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dan Kuwait adalah masih besarnya impor produk migas dari Kuwait ke Indonesia. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia di Kuwait tergolong kecil dan tidak termasuk dalam 10 entitas terbesar di Kuwait jika dibandingkan dengan Filipina, Mesir, India, Pakistan, dan Bangladesh. Produk-produk dari negara-negara tersebut dinilai mendominasi pasar Kuwait karena tingginya permintaan yang notabene berasal dari warga negara produk tersebut berasal.
- b. Minat pengusaha Kuwait terhadap produk dan tenaga kerja Indonesia cukup besar, mereka mengakui keunggulan Indonesia adalah kualitas yang lebih diminati dari negara importir di wilayah Asia dan Eropa lainnya, namun kendala yang dihadapi adalah biaya logistic pengiriman container yang tinggi mengakibatkan harga produk kurang kompetitif dibandingkan dengan produk yang sama dari negara lainnya.
- c. Tidak ada jalur penerbangan langsung dari Indonesia ke Kuwait.

- d. Keterbatasan bahan/barang promosi.

Upaya Perbaikan

Berdasarkan analisis atas kendala dan tantangan yang dihadapi di sektor perdagangan, KBRI Kuwait City akan terus melaksanakan *flagship program* yang telah diagendakan sesuai dengan renaksi Perwakilan RI. Namun demikian, untuk mencapai Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City yang Optimal, KBRI akan meningkatkan intensitas dan upaya-upaya yang dilakukan, khususnya dalam mempromosikan produk Indonesia dan membangun jaringan dengan para *stakeholders* terkait di kedua negara.

Analisis Program Pendukung Capaian

1. Upaya membangun jejaring kerja baik pada level Tinggi maupun level teknis. Membangun jejaring dilakukan untuk membina hubungan baik, mempromosikan, dan memberikan perkembangan terkini tentang potensi produk Indonesia.
2. Promosi perdagangan baik dalam bentuk partisipasi pada pameran/festival dagang yang diselenggarakan oleh mitra terkait di negara akreditasi.
3. Aktif dalam memfasilitasi *business matching* antara pengusaha Indonesia dan mitra di wilayah akreditasi baik secara luring maupun daring.
4. Penyelenggaraan Indonesia Trade Tourism Forum and Exhibition (ITTTF). Forum pada kegiatan ITTF menjadi wadah untuk menyampaikan potensi-protensi Indonesia di sektor perdagangan dan sarana untuk melakukan business matchmaking, sementara kegiatan pameran dapat menjadi wahana untuk memamerkan dan mempromosikan produk-produk Indonesia.

Proyeksi Kedepan

1. Sepanjang pelaksanaan tugas dan fungsi KBRI Kuwait City di negara akreditasi, KBRI terus aktif untuk melakukan koordinasi dan harmonisasi program dengan Pusat. Pada tahun 2024, melalui Direktorat Timur Tengah, rencananya akan diselenggarakan Indonesia – Kuwait *Economic and Development Cooperation Dialogue* (ECDL). Kegiatan ini direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada level Menteri dengan berfokus pada hubungan perdagangan, khususnya peningkatan ekspor Indonesia, kerja sama energi, infrastruktur, serta penempatan PMI sektor formal di Kuwait.
2. KBRI Kuwait City akan terus melakukan pendampingan dan monitoring terhadap beberapa kesepakatan dagang yang telah dicanangkan pada tahun 2023 dan potensi-potensi dagang yang menjadi hasil dari kegiatan ITTFE 2023.

Dokumentasi

Analisis IKU S1.2

Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

Deskripsi IKU

IKU ini sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang investasi agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. SUB IKU ini secara spesifik mengukur *value* yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk investasi.

IKU ini memiliki 2 SUB IKU, yakni:

1. SUB IKU-1: Jumlah komitmen investasi, dengan bobot 70%

SUB IKU ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis antara Indonesia dengan negara mitra yang memuat nilai investasi in-bound. Komitmen diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut investasi, seperti *business matching*, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi investasi, dan forum kerja sama. Jumlah komitmen investasi dihitung dari perolehan komitmen baru yang difasilitasi oleh KBRI Kuwait City dari Januari - Desember tahun berjalan.

SUB IKU-1 mendapatkan alokasi bobot 70% karena pelaksanaan promosi dan fasilitasi proses pembentukan komitmen investasi merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Kemenlu.

2. SUB IKU 2: Nilai investasi dengan negara mitra, dengan bobot 30%

SUB IKU ini mengukur nilai investasi in-bound yang terealisasi (dalam mata uang USD) untuk suatu negara akreditasi di suatu tahun. Pencapaian target IKU ini membutuhkan kolaborasi yang kuat dan intensif antara Perwakilan RI dengan entitas yang bernaung dalam Indonesia *Incorporated* (ITPC, IIPC) di negara tersebut. Realisasi SUB IKU 2 adalah perolehan nilai investasi dari Januari - September tahun berjalan.

SUB IKU 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian SUB IKU dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenlu namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, dunia usaha, dll).

Informasi Kinerja

Tabel III.x
Capaian IKU S1.2 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	Capaian SUB IKU 1 : Jumlah komitmen investasi (70%)	2
	Capaian SUB IKU 2 : Nilai investasi dengan negara mitra (30%)	USD 362.500
Realisasi		156,73
Target		94%
Capaian		120
Batas Toleransi <i>(opsional jika capaian melebihi 120%)</i>		120

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2023, realisasi IKU S1.2 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City adalah sebesar 156,73 dari target sebesar 94%, sehingga capaian IKU sebesar 120% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Realisasi IKU S1.2 diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian SUB IKU 1 dan SUB IKU 2. Pada tahun 2023, realisasi SUB IKU 1 Jumlah komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City adalah sebesar 2 dari target sebesar 1, sehingga capaian IKU sebesar 200 dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Perolehan komitmen investasi terdiri dari kerja sama: (i) keseriusan *Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company* (KUFPEC) untuk ekspansi investasi eksplorasi migas dan produk hydro-carbon Indonesia, khususnya pada proyek blok Masela, East Natuna, Sumbagsel, dan Merangin III, dan (ii) proyek *operation and maintenance* kerja sama PT Cogindo Daya Bersama (CDB) dan Kementerian Listrik dan Air Kuwait.

Realisasi SUB IKU 2 Nilai investasi dengan negara mitra KBRI Kuwait City adalah sebesar USD 356.500 dari target sebesar USD 650.000, sehingga capaian IKU sebesar 55,77% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.x
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IKU Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City

IKU	2022			2023		
	T	R	C	T	R	C
S1.2	93,34%	120%	120%	94%	156,73%	223,90 ↑
SUB IKU 1	2	1	50%	1	2	200
SUB IKU 2	USD 600.000	USD 150.000.000	120%	USD 650.000	USD 362.500	55,77%↓

IKU S1.2 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City ini diadopsi pada tahun 2022 setelah dilakukan evaluasi dan ditajamkan kembali sehingga dapat mengukur proses diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh KBRI Kuwait City untuk itu capaian IKU di tahun 2023 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, target SUB IKU 1 mengalami penurunan target menjadi 1 komitmen dari 2 komitmen pada tahun 2022. Penurunan target ini berasal dari hasil pengamatan Perwakilan akan potensi investasi yang mungkin akan dicapai pada tahun 2023 dan berdasarkan dari realisasi SUB IKU pada tahun 2022. Meskipun demikian, pada pelaksanaannya, realisasi SUB IKU 1 mengalami peningkatan menjadi 2 dari 1 komitmen pada tahun 2022. Peningkatan ini merupakan hasil dari upaya Perwakilan salah satunya melalui penyelenggaraan Indonesia Investment Forum (IIF), guna mempromosikan potensi investasi Indonesia kepada pihak Kuwait.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, target SUB IKU 2 mengalami peningkatan target menjadi USD 650.000 dari USD 600.000 pada tahun 2022. Peningkatan target ini disebabkan oleh tingginya realisasi SUB IKU 2 pada tahun 2022. Sedangkan untuk realisasi SUB IKU 2 pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi USD 362.500 dari USD 150.000.000 pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh belum adanya realisasi investasi inbound terbaru dari Kuwait yang masuk ke Indonesia.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Secara umum pencapaian IKU dapat dikatakan berhasil. Namun demikian, berdasarkan data NSWI BKPM, pada tahun 2023 investasi Kuwait di Indonesia meliputi 12 proyek meliputi pertambangan, hotel dan restoran, perumahan, industry dan perkantoran, dan kategori jasa

lainnya. Meskipun jumlah proyek meningkat dari 8 proyek (2022) menjadi 12 proyek (2023), namun nilai investasi tercatat menurun.

IKU ini dapat tercapai karena adanya 2 komitmen investasi Kuwait ke Indonesia. Namun KBRI Kuwait City masih memiliki tugas untuk terus meningkatkan nilai investasi melalui promosi potensi investasi Indonesia kepada *stakeholders* terkait di Kuwait.

Kendala dan Tantangan

Secara umum, karakter investor Kuwait lebih cenderung tertarik pada investasi *brown field*. Indonesia masih terus berusaha untuk memperkenalkan potensi-potensi investasi di tanah air khususnya Peluang Investasi Pembangunan Proyek Ibukota Negara (IKN) “Nusantara”, Proyek 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba – Sumatera Utara, Borobudur – Jawa Tengah, Labuan Bajo – Provinsis Nusa Tenggara Timur, Mandalika - Provinsi Nusa Tenggara Barat, Likupang – Provinsi Sulawesi Utara), dan Proyek Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Upaya Perbaikan

1. Meningkatkan intensitas promosi sektor-sektor investasi potensial di Indonesia, baik melalui media sosial, pameran, maupun pertemuan langsung secara *door-to-door* dengan para *stakeholders* terkait.
2. Melakukan *assessment* yang tajam terhadap potensi-potensi investasi yang sedang dijangkau, guna menghindari adanya penipuan investasi
3. Memfasilitasi dan mendampingi Perusahaan Indonesia dalam mempromosikan dan menindaklanjuti potensi investasi dengan mitra di Kuwait.

Proyeksi Kedepan

1. Pelaksanaan kegiatan seperti Indonesia Investment Forum (IIF) memberikan pengaruh yang kuat untuk promosi potensi investasi di Indonesia. Ke depannya, program sejenis akan diupayakan agar dilakukan setiap tahun dengan koordinasi yang lebih baik dengan para *stakeholders* terkait.
2. Menjalin komunikasi dengan Kementerian Investasi RI dan Indonesia Investment Authority (INA) untuk bahan-bahan promosi dan informasi potensi investasi di Indonesia yang dapat dipromosikan di Kuwait.
3. Bekerja sama dengan *stakeholders* terkait di Indonesia dan Kuwait untuk mengkurasi proyek-proyek dan perusahaan-perusahaan investasi yang potensial.

Dokumentasi

Analisis IKU S1.3

Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

Deskripsi IKU

IKU S1.3 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang pariwisata agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air.

IKU ini memiliki 2 SUB IKU, yakni:

1. SUB IKU 1: Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia

Salah satu output diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Kemenlu adalah promosi pariwisata. IKU ini mengukur efektivitas penyelenggaraan promosi tersebut dengan mengukur seberapa tinggi minat wisatawan mancanegara potensial yang merupakan WNA yang memiliki ekspektasi untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia setelah melihat/menghadiri/berpartisipasi pada promosi pariwisata dan budaya yang diselenggarakan oleh Kemenlu atau event promosi yang diselenggarakan pihak lain di mana Kemenlu turut menjadi peserta event.

SUB IKU ini mengukur wisatawan mancanegara yang memiliki ekspektasi tinggi untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia. Level ekspektasi diukur dengan suatu angka antara 1 - 5, dimana 5 adalah level yang menunjukkan responden sangat setuju bahwa promosi Indonesia telah berhasil meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia, dan level 1 adalah level yang menunjukkan responden sangat tidak setuju bahwa promosi Indonesia meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia. Ekspektasi tinggi ditunjukkan pada level 4 - 5.

SUB IKU 1 mendapatkan alokasi bobot 70% karena pelaksanaan promosi pariwisata dan budaya untuk mendorong kunjungan wisatawan mancanegara merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Kemenlu.

2. SUB IKU 2: Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

SUB IKU 2 menunjukkan jumlah total warga dari negara asing yang mengadakan perjalanan wisata ke Indonesia.

SUB IKU 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian sub IKU dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenlu namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, Pemda, masyarakat dll) dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya.

Informasi Kinerja

Tabel III.x
Capaian IKU S1.3 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City	Capaian SUB IKU 1 : Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia (70%)	131,58
	Capaian SUB IKU 2 : Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (30%)	260,67
Realisasi		102,24
Target		94,08
Capaian		108,67
Batas Toleransi <i>(opsional jika capaian melebihi 120%)</i>	

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2023, realisasi IKU S1.3 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City adalah sebesar 102,24 dari target sebesar 94,08% sehingga capaian IKU sebesar 108,67% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Realisasi IKU S1.3 diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian SUB IKU 1 dan SUB IKU 2. Pada tahun 2023, realisasi SUB IKU 1 Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari negara akreditasi KBRI Kuwait City adalah sebesar 100% dari target sebesar 76%, sehingga capaian IKU sebesar 131,58% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Realisasi SUB IKU 2 Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia dari negara akreditasi KBRI Kuwait City adalah sebesar 4.692 dari target sebesar 1.800, sehingga capaian IKU sebesar 260,67% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.x
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IKU Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City

IKU	2022			2023		
	T	R	C	T	R	C
S1.3	77,88%	120%	120%	94,08% ↑	102,24 ↑	108,24%
SUB IKU 1	75,54%	100%	120%	76% ↑	100% ↑	131,58
SUB IKU 2	250	1.814	120%	1.800 ↑	4.692 ↑	260,67

IKU S1.3 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City ini diadopsi pada tahun 2022 setelah dilakukan evaluasi dan ditajamkan kembali sehingga dapat mengukur proses diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh *KBRI Kuwait City*. Untuk itu capaian IKU di tahun 2023 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, target SUB IKU 1 mengalami peningkatan target menjadi 76% dari 75,54% pada tahun 2022. Peningkatan target ini disebabkan oleh tercapainya realisasi dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Realisasi SUB IKU 1 juga berada pada posisi yang sama dengan realisasi riil pada tahun 2022, yaitu 100%. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh KBRI pada berbagai kesempatan, 100% responden menyatakan keinginannya untuk berkunjung ke Indonesia atau memasukkan Indonesia ke salah satu destinasi wisata mereka.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, target SUB IKU 2 mengalami peningkatan target menjadi 1.800 dari 250 pada tahun 2022. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, jumlah kunjungan wisatawan dari Kuwait ke Indonesia pada 2023 tercatat sejumlah 4692 dan pada 2022 sebanyak 2121 wisatawan. Angka ini menunjukkan peningkatan sebanyak 221% di tahun 2023. Oleh karena itu, target pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Sedangkan untuk realisasi SUB IKU 2 mengalami peningkatan menjadi 4.692 dari 1.814 pada tahun 2022. Berdasarkan pengamatan KBRI Kuwait City, peningkatan ini disebabkan karena wisatawan Kuwait semakin familiar dengan Indonesia dan kerja sama promosi pariwisata dengan agensi perjalanan di Kuwait.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Dengan semakin terbukanya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kuwait pasca pandemi, KBRI Kuwait City terus melaksanakan program promosi pariwisata dan budaya dengan memanfaatkan anggaran dengan efisien dan efektif. Promosi dan survey untuk tetap membangun “*awareness*” warga Kuwait terhadap tujuan destinasi ke Indonesia serta mengetahui potensi wisatawan dari Kuwait Indonesia telah dilakukan.

Upaya-upaya ini selalu dilakukan dalam berbagai kesempatan, diantaranya melalui upaya pelaksanaan pameran dan promosi, baik yang diselenggarakan langsung oleh KBRI, maupun

berupa partisipasi pada kegiatan pameran dan promosi yang diselenggarakan oleh *stakeholders* terkait, promosi pariwisata melalui media local, serta menjaga komunikasi yang baik dengan para *stakeholders* terkait.

Kendala dan Tantangan

Mengundang wisatawan Kuwait ke Indonesia merupakan tantangan sendiri. Beberapa hambatan antara lain adalah:

1. Preferensi tujuan utama mereka adalah Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, dengan alasan kenyamanan dan efisiensi saat berwisata.
2. Belum adanya penerbangan langsung dari Kuwait ke Indonesia dan sebaliknya, sementara minat Kuwaiti untuk mengunjungi pulau Bali sangat besar.
3. Waktu liburan mengikuti jadwal liburan sekolah anak yang bertepatan dengan musim panas yaitu dari bulan Juni – September. Terkait ini, promosi wisata sebaiknya dilakukan sejak bulan September tahun sebelumnya dimana Kuwaiti sedang merencanakan destinasi tujuan wisata.

Upaya Perbaikan

Untuk meningkatkan tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City, KBRI telah merencanakan Upaya strategis sebagai berikut:

1. *Virtual Direct Selling* oleh travel agen Indonesia di Kuwait dalam rangka *Sales Mission*.
2. Webinar Edukasi pariwisata Indonesia kepada travel agen Kuwait.
3. Promosi berkala di berbagai media *online* dan *outdoor* di area publik.
4. Perpaduan promosi wisata dan kuliner untuk membangkitkan rasa ingin tahu/ *the real feeling* mengunjungi asal kuliner di Indonesia.
5. Tetap melakukan promosi dalam skala kecil dan lebih *segmented* sesuai dengan trend yang berlangsung.

Analisis Program Pendukung Capaian

Pada umumnya masyarakat Kuwait memiliki minat yang tinggi terhadap kegiatan yang memiliki nilai kesenian dan budaya. Keberagaman kesenian dan budaya Indonesia dinilai eksotis dan menarik bagi Masyarakat Kuwait. Beberapa program kerja yang dinilai dapat menunjang dan mendukung keberhasilan IKU ini adalah:

1. Promosi pariwisata dan keindahan alam Indonesia melalui media sosial KBRI Kuwait City.
2. Pelaksanaan Resepsi Diplomatik. Keberagaman busana daerah yang digunakan oleh para Pejabat dan Staff KBRI selalu dinilai menarik bagi para tamu undangan resepsi dan mengundang rasa ingin tahu yang besar terhadap kebudayaan Indonesia.
3. Promosi ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata Indonesia pada televisi lokal. KBRI Kuwait City telah beberapa kali melakukan wawancara dan liputan bersama dengan beberapa statusun televisi lokal, antara lain memperkenalkan kuliner Nusantara melalui program “Indonesia Spice Up the World” dan program Ramadan yang menceritakan tentang situasi Bulan Ramadan di Indonesia.

Proyeksi Kedepan

Pada tahun 2024, KBRI Kuwait City akan menerapkan beberapa strategi yang telah disusun untuk meningkatkan tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Kuwait City, yaitu dengan melaksanakan beberapa kegiatan rutin terkait sektor pariwisata dan melakukan beberapa terobosan antara lain;

1. *Virtual Direct Selling* oleh travel agen Indonesia di Kuwait dalam rangka *Sales Mission*.
2. Webinar Edukasi pariwisata Indonesia kepada travel agen Kuwait.
3. Promosi berkala di berbagai media online dan outdoor di area publik.
4. Perpaduan promosi wisata dan kuliner untuk membangkitkan rasa ingin tahu/ the real feeling mengunjungi asal kuliner di Indonesia.
5. Tetap melakukan promosi dalam skala kecil dan lebih segmented sesuai dengan trend yang berlangsung.

Dokumentasi

- **Resepsi Diplomatik**

Setelah ditiadakan selama pandemi dan dimulai kembali pada tahun 2022, tahun 2023 KBRI kembali menggelar kegiatan Resepsi Diplomatik yang merupakan rangkaian kegiatan peringatan HUT RI. Namun pada tahun ini, resepsi diplomatik yang rencananya digelar lebih meriah dengan kedatangan pengisi acara dari Paguyuban Citra yang didirikan oleh Bapak Agum Gumelar harus dibatalkan setelah melalui kurang lebih 10 bulan persiapan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah setempat untuk meniadakan pertunjukan musik dan pagelaran meriah sebagai wujud solidaritas terhadap Palestina.

Resepsi Diplomatik, 22 Oktober 2023

Resepsi Diplomatik tetap dilaksanakan tanpa pertunjukan musik dan budaya meski tetap mengutamakan promosi budaya dan kuliner Indonesia sekaligus menunjukkan sikap tegas Indonesia dalam mendukung Palestina.

Undangan dari kalangan korps diplomatik di Kuwait dan *counterparts* dari KBRI hadir dalam memeriahkan kegiatan yang tetap mendapat sambutan meriah dari para tamu.

- **Partisipasi pada Kegiatan-Kegiatan Promosi Wisata dan Budaya.**

KBRI ikut serta dalam berbagai kegiatan lokal yang mengusung tema pariwisata dan budaya. Selain itu, KBRI juga menyelenggarakan kegiatan promosi baik bekerja sama dengan pihak terkait maupun secara mandiri dalam mempromosikan pariwisata dan budaya Indonesia Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

National Day and Heritage Expo 2023, 14-16 Februari 2023

Tari Bali di Avenues Mall for Kuwait National Day Celebration, 17 February 2023

Promosi Pariwisata Indonesia kerja sama dengan Flyworld Luxury Travel, 17 Mei 2023

Promosi Kuliner "Indonesia Spice Up the World", 17 September 2023

Booth Indonesia pada Asian Bazaar 2023, 6 Oktober 2023

Indonesian Food Festival 2023 kerja sama dengan Crowne Plaza Hotel,
25-26 Oktober 2023

Pameran Kebudayaan di Kuwait University, 10 Desember 2023

Indonesia Winter Market, 15 Desember 2023

- **Live Talk Show Promosi Indonesia di Televisi Lokal**

Semakin banyak undangan untuk KBRI tampil di beberapa program televisi lokal pada tahun 2023. Kesempatan ini digunakan dengan baik untuk terus menerus mempromosikan Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, budaya, pariwisata, maupun mensosialisasikan profesionalisme pekerja migran asal Indonesia.

Good Morning Kuwait, 26 Maret 2023

Wawancara KTV, 8 November 2023

Good Morning Kuwait, 20 November 2023

Diplomatic Program KTV, 15 Desember 2023

Wawancara Marina TV, 22 Desember 2023

Untuk menjaga hubungan baik dengan media lokal Kuwait, KBRI juga senantiasa membangun komunikasi dengan para wartawan lokal.

Pertemuan dengan Media, 12 September 2023

S2 Citra Positif Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

Citra positif Indonesia adalah persepsi yang dipercayai/diyakini aktor lain terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan internasional, pola perilaku tersebut terbangun berdasarkan power yang dimiliki baik yang bersifat *hard* maupun *soft*. Citra juga merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, sehingga dapat menempatkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam berbagai aspek kehidupan.

Analisis IKU S2.1

Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

Deskripsi IKU

Indeks Citra adalah Indeks yang mengukur kesan atau pandangan dunia internasional terhadap negara Indonesia di dunia internasional yang dilakukan secara periodik triwulanan.

Indeks Citra Indonesia diperoleh berdasarkan survei yang mengukur 3 dimensi, yaitu *TOURISM & SOCIO-CULTURE*, *ECONOMY*, dan *GOVERNANCE AND RULE OF LAW*. Sumber data didapatkan berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diolah pada aplikasi pengelolaan data citra Indonesia di dunia internasional (<https://citraindonesia.kemlu.go.id>). Kuesioner disebar oleh seluruh Perwakilan RI di Luar Negeri kecuali Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) dengan responden Warga Negara Asing di negara akreditasi/wilayah kerja.

Interval	Kategori Indeks
4,21 - 5,00	Sangat Baik
3,41 - 4,20	Baik
2,61 - 3,40	Cukup
1,81 - 2,60	Kurang
1,00 - 1,80	Tidak Baik

Formula perhitungan IKU S2.1 adalah sebagai berikut:

Informasi Kinerja

Tabel III.x
Capaian IKU S2.1 Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City	Total Indeks Rata-Rata Seluruh Responden	4,09
	Jumlah Total Responden	102
Realisasi		4,09
Target		3,95
Capaian		103,54
Batas Toleransi <i>(opsional jika capaian melebihi 120%)</i>		N/A

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2023, realisasi IKU S2.1 Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City adalah sebesar 4,09 dari target sebesar 3,95, sehingga capaian IKU sebesar 103,54.

Perbandingan Kinerja

Target IKU S2.1 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan 3,95 (kategori Baik), dan terealisasi sebesar 4,09 (Kategori Baik), dengan capaian IKU sebesar 103,54%. Capaian IKU tahun 2023 menunjukkan nilai indeks citra yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

Tabel III.x
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IKU Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

IKU	2020		2021		2022		2023		
	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>C</i>
S2.1	3,8	3,93	3,85	4,22	3,9	3,86	3,95 ↑	4,09 ↑	56,7%

Dalam periode 2020-2023 realisasi IKU S2.1 Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini disebabkan oleh keberhasilan upaya promosi dan edukasi tentang Indonesia dan potensi-potensi yang dimiliki.

Peningkatan juga didukung dengan pelayanan public yang prima dan menjangkau seluruh lapisan Masyarakat Indonesia di Kuwait.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah responden survei citra positif Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 41 responden, yaitu 102 responden dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 61 responden.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Survei citra Indonesia dilakukan melalui 2 cara, yaitu *offline* dan *online*. Secara *offline*, survei disebar dengan membagikan kertas survei di sela-sela acara promosi yang dihadiri oleh WN Kuwait dan WNA kalangan menengah ke atas, sedangkan cara *online* yaitu dengan menyebarkan tautan yang tersambung ke pengisian survei secara *online* yang dapat dilakukan melalui telepon selular.

Sebagai informasi beberapa acara promosi citra positif Indonesia yang berhasil dilaksanakan sesuai dengan Renaksi IKU ini antara lain adalah:

a) Pengisian manual pada kertas formulir survey.

Formulir disebar saat KBRI Kuwait berpartisipasi dalam festival promosi budaya dan pariwisata selama tahun 2023. Formulir juga disediakan di ruang loket pelayanan konsuler agar dapat pula diisi oleh pengunjung WNA.

b) Pengisian online melalui online survey Kementerian Luar Negeri.

Untuk menambah akses, kuesioner dijadikan *online survey*. Menindaklanjuti arahan dari Ditjen IDP Kemlu, kuesioner <https://kem.lu/viewofindonesia> juga disebarluaskan melalui media sosial dan whatsapp group masyarakat Indonesia di Kuwait.

c) Melakukan kegiatan pengelolaan situs portal dan media sosial Perwakilan RI Kuwait.

Tim Pengelola Informasi Publik KBRI Kuwait (PID) melaksanakan tugas:

- Manajemen info di portal dan di 4 akun medsos (pengumuman, pelaksanaan kegiatan, layanan kekonsuleran, dll).
- Koordinasi permintaan info dan broadcast info atau posisi secara lintas fungsi, termasuk dengan operator nomor *hotline*.
- Broadcast konten promosi persahabatan (p-to-p), seni budaya dan pariwisata.
- Presentasi mengenai rekap upaya diplomasi KBRI Kuwait selama 1 tahun (dilaksanakan pada pekan 3-4 Desember TA berjalan atau pekan 1-2 Januari TA berikutnya).

d) Terlibat dalam Kegiatan Korps Diplomatik

Dalam upaya membangun citra positif Indonesia, KBRI juga terlibat aktif pada beberapa kegiatan bersama inisiasi dengan korps diplomatik maupun organisasi internasional di Kuwait. Salah satunya dengan terlibat dalam program Young Ambassador yang merupakan proyek korps diplomatik dalam memperkenalkan dunia diplomasi kepada siswa sekolah menengah di Kuwait dengan memasang para siswa dengan Kedutaan Besar yang terlibat dalam program dimaksud.

e) Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan WNI.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan selama tahun 2023 semakin banyak dibandingkan tahun 2022 yang masih merupakan masa peralihan dari pandemi. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KBRI Kuwait City beberapa juga melibatkan Forum Diaspora Indonesia Kuwait (FDIK) dan forum masyarakat lainnya.

f) Menyelenggarakan Kegiatan Upacara

Upacara peringatan HUT RI pada tahun 2023, sebagaimana pula beberapa kegiatan upacara lainnya diselenggarakan secara tatap muka. Berikut dokumentasi dari beberapa kegiatan upacara bendera yang dilakukan pada tahun 2023:

Kendala dan Tantangan

Secara internal, PID terus melakukan pengembangan diri dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengambilan materi foto, video dan audio serta penyuntingan. Hal ini tentunya perlu didukung dengan perangkat dan peralatan yang memadai, seperti aplikasi, antivirus, lampu, kamera, komputer, mini mixer/switch panel dan mikrofon.

KBRI Kuwait telah melengkapi keperluan perangkat dan peralatan tersebut yang akan selalu memerlukan *update* dengan teknologi terbaru. Selain itu, para staf di masing-masing fungsi juga perlu dibekali dengan kemampuan pengambilan materi foto, video dan audio yang cukup.

Upaya Perbaikan

KBRI akan terus melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan manajemen media sosial guna mendukung promosi Indonesia di wilayah akreditasi. Selain itu, hubungan baik yang telah terjalin dengan para *counterparts* akan selalu dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan dukungan dan rasa kepemilikan pada konten diseminasi.

Analisis Program Pendukung Capaian

1. Pesta Rakyat dalam perayaan HUT RI
2. Aktif menyebarkan form survey Kementerian Luar Negeri
3. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai sarana perkumpulan Masyarakat
4. Penyelenggaraan kegiatan olahraga dengan komunitas Indonesia
5. Perayaan Hari Raya (Natal, Idul Fitri, dan Idul Adha)
6. Silaturahmi dan pembinaan dengan beberapa perwakilan Masyarakat

Proyeksi Kedepan

Sebagai Upaya untuk terus meningkatkan indeks citra positif Indonesia di wilayah akreditasi KBRI Kuwait City, KBRI akan melanjutkan program-program yang baik untuk meningkatkan citra Indonesia dan terus mencari terobosan baru yang sesuai untuk diimplementasikan di wilayah akreditasi.

Dokumentasi

Youtube KBRI Kuwait City

Twitter, Instagram, Facebook KBRI Kuwait City

B1 Diplomasi Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City yang Kuat

Sasaran strategis ini berfokus pada pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan diplomasi bilateral. Relasi bilateral perlu didorong untuk bersifat mutualistik, yakni di satu sisi dapat memastikan terjaganya kepentingan Indonesia, dan di sisi lain, relasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Hubungan bilateral mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan, serta maritim.

Dalam dinamika relasi antar negara, kepentingan Indonesia di bidang tersebut diperjuangkan melalui diplomasi bilateral. Sejumlah hal menyangkut kepentingan Indonesia dapat diusulkan, dan selanjutnya dibahas melalui proses negosiasi dan perundingan. Kinerja terkait sasaran strategis ini adalah keberhasilan mencapai kesepakatan yang memberikan *assurance* terhadap terjaganya kepentingan Indonesia dalam hubungan antar negara. Sasaran strategis ini mencerminkan prioritas strategis yang mesti dicapai oleh Perwakilan RI dalam rangka relasi bilateral dengan negara akreditasi yang menjadi naungan Perwakilan.

Sasaran Strategis (SS) B1 diukur berdasarkan capaian pada 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. IKU B1.1: Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City
2. IKU B1.2: Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City
3. IKU B1.3: Indeks Respon Positif terhadap Informasi *Data Economic Intelligence/Market Intelligence* tentang Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

Analisis IKU B1. 1

Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

Deskripsi IKU

IKU B1.1 merupakan IKU yang menghitung jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang bersumber dari *joint statement, report of the meeting, summary of discussion, summary record, joint communique, agreed minutes, declaration, agreements, memorandum of understanding, agreed plan of action/work plan, treaty, charter, dan joint press statement*. IKU ini bertujuan untuk mengetahui kapabilitas diplomasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam hubungan bilateral.

Pentingnya kesepakatan bilateral di bidang ekonomi, sosial dan budaya bagi Indonesia dimaksudkan untuk terus memajukan potensi bidang tersebut dalam mendukung kemajuan ekonomi Indonesia dan meningkatkan citra positif Indonesia. Hal ini sesuai dengan komitmen Kemenlu seperti yang tercantum dalam Renstra 2020 - 2024.

Informasi Kinerja

Tabel III.x
Capaian IKU B1.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	1
Realisasi		1
Target		1
Capaian		100
Batas Toleransi (<i>opsional jika capaian melebihi 120%</i>)		N/A

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2023, realisasi IKU B1.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City adalah sebesar 1 dari target sebesar 1 sehingga capaian IKU sebesar 100%. Realisasi dari target tersebut adalah konsep *Technical Arrangement* (TA) untuk penempatan PMI Profesional Sektor Kesehatan di Kuwait. Walaupun masih berupa konsep, namun proses diskusi dan negosiasi untuk finalisasi konsep tersebut terus berjalan secara bilateral, baik melalui tatap muka langsung maupun luring.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.x
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IKU Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

IKU	2022			2023		
	T	R	C	T	R	C
B1.1	3	3	100%	1 ↓	1 ↓	100%

IKU B1.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City diadopsi pada tahun 2022. Untuk itu capaian IKU di tahun 2023 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, target IKU B1.1 mengalami penurunan target menjadi 1 dari 3 pada tahun 2022. Penurunan target ini karena selepas tahun 2022, tidak terdapat inisiatif maupun proses pembahasan kesepakatan kerja sama di bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sedang berjalan. Sehingga ditetapkan untuk target tahun 2023 adalah 1 Kesepakatan. Untuk realisasi IKU B1.1 pada prinsipnya tercapai 100% sesuai dengan target tahun 2023, namun mengalami penurunan secara kuantitas menjadi 1 dari 3 pada tahun 2022, karena terdapat penurunan target sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Sepanjang tahun berjalan (2023) hingga saat ini, terdapat 1 (satu) dokumen kesepakatan yang masih dalam proses diskusi dan pembahasan, yaitu *Technical Arrangement* (TA) G to G antara RI – Kuwait tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Profesional Kesehatan Indonesia di Kuwait.

Kendala dan Tantangan

Perjanjian terkait penempatan PMI sektor Kesehatan di Kuwait berlangsung cukup lama karena masih belum ditemukan titik Tengah dari negosiasi kedua belah pihak, khususnya terkait kontrak kerja bagi PMI yang akan ditempatkan di Kuwait.

Upaya Perbaikan

KBRI terus memfasilitasi dan mengawal proses diskusi dan negosiasi untuk finalisasi *Technical Arrangement* (TA) G to G antara RI – Kuwait tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Profesional Kesehatan Indonesia di Kuwait.

Koordinasi erat dengan Pusat, dalam hal ini HP Sosbud Kemlu, Dit. Timur Tengah Kemlu, Kemenaker, dan BP2MI, terus dilaksanakan dengan intens sebagai Upaya finalisasi TA Ketenagakerjaan RI-Kuwait.

Dokumentasi

Analisis IKU B1.2

Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

Deskripsi IKU

IKU B1.2 merupakan IKU yang menghitung jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan dan maritim yang bersumber dari *joint statement, report of the meeting, summary of discussion, summary record, joint communique, agreed minutes, declaration, agreements, memorandum of understanding, agreed plan of action/work plan, treaty, charter, dan joint press statement*. IKU ini bertujuan untuk mengetahui kapabilitas diplomasi di bidang politik, keamanan dan maritim yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam hubungan bilateral.

Pentingnya kesepakatan bilateral di bidang politik, keamanan dan maritim bagi Indonesia selaras dengan strategi Kemenlu dalam memperkuat integritas NKRI dan diplomasi politik, keamanan dan maritim seperti yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Informasi Kinerja

Tabel III.x

Capaian B1.2 Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City	Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim	1
Realisasi		1
Target		1
Capaian		100
Batas Toleransi (<i>opsional jika capaian melebihi 120%</i>)		N/A

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2023, realisasi IKU B1.2 Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City adalah sebesar 1 dari target sebesar 1, sehingga capaian IKU sebesar 100% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.x
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IKU Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

IKU	2022			2023		
	T	R	C	T	R	C
B1.1	1	1	100%	1 ↑↓	1 ↑↓	100%

IKU B1.2 Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City diadopsi pada tahun 2022. Untuk itu capaian IKU di tahun 2023 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, target IKU B1.2 adalah sama, yaitu 1 seperti pada tahun 2022 yaitu 1 perjanjian. Penetapan target ini berdasarkan pada potensi perjanjian yang akan dan/atau sedang berlangsung dari tahun 2022. Untuk realisasi IKU B1.2 tercatat tetap sama dengan realisasi pada tahun 2022 yaitu 1 perjanjian, dengan capaian 100%. Pada 30 November 2023, Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Supreme Judicial Council (SJC) Kuwait melakukan penandatanganan MoU Kerja Sama Sistem Peradilan antara Mahkamah Agung RI dan SJC.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Salah satu pendukung keberhasilan pelaksanaan IKU ini adalah sikap proaktif dan komunikasi yang intens dengan *stakeholders* terkait baik di Indonesia maupun di Kuwait.

Kendala dan Tantangan

Secara umum, tantangan dalam pelaksanaan IKU ini adalah dalam hal pendekatan kepada pejabat Kuwait yang berada dalam koridor formal. Komunikasi informal sering tidak ditanggapi atau kebiasaan pejabat pemerintah yang tidak selalu memberikan jalur / kontak pribadinya. Selain itu adalah koordinasi internal antar instansi pemerintah Kuwait yang tidak selalu lancar.

Upaya Perbaikan

Tindak lanjut yang telah dilakukan untuk mengatasi kebiasaan masyarakat Kuwait ini adalah dengan secara proaktif melakukan pendekatan pada setiap kesempatan pertemuan di berbagai acara. Selain itu dalam persiapan suatu kegiatan bersama KBRI Kuwait selalu berinisiatif menyiapkan dokumen, program kegiatan, dan pengaturan keprotokolan lainnya.

Terkait pada pemanfaatan Biaya Operasional Kepala Perwakilan dan Representasi Home Staff, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pejabat HS KBRI

Kuwait melaksanakan kegiatan Representasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kemudian melengkapi dengan data dukung sebagai pertanggungjawaban.

Proyeksi Kedepan

Pelaksanaan IKU ini akan Kembali menetapkan target 1 kesepakatan karena dinilai masih realistis dan achievable. Saat ini belum terdapat pembahasan kesepakatan yang bersifat *on going*, namun KBRI Kuwait City akan mengawal kemungkinan adanya kesepakatan turunan berupa *technical arrangement* (TA) sebagai lanjutan dari MoU Kerja sama Sistem Peradilan yang telah disepakati antara Mahkamah Agung RI dan SJC Kuwait.

Dokumentasi

Analisis IKU B1.3

Indeks Respon Positif terhadap Informasi *Data Economic Intelligence/Market Intelligence* tentang Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

Deskripsi IKU

Dalam menjalankan diplomasi ekonomi, Perwakilan RI harus mencermati potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing negara yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. *Data economic intelligence/market intelligence* adalah informasi dan hasil analisis di bidang ekonomi (perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, dan jasa) termasuk informasi peluang produk spesifik yang bersifat strategis bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara/wilayah akreditasi. *Data economic intelligence* disusun dan dimutakhirkan secara berkala setiap tahun dari masing-masing negara/wilayah kerja dan rangkapannya, jika ada.

Respon positif adalah Pernyataan yang mengindikasikan *Data Economic Intelligence/Market Intelligence* yang dihasilkan bermanfaat bagi Kemenlu Pusat. Pernyataan tersebut diperoleh dari penerima manfaat dan penilaian dilakukan oleh Ditjen Amerop dan Ditjen Aspasaf. Indeks respon positif berada pada skala 1-5, yaitu:

Indeks	Kategori Indeks
Skala 1	Tidak Bermanfaat
Skala 2	Kurang Bermanfaat
Skala 3	Cukup Bermanfaat
Skala 4	Bermanfaat
Skala 5	Sangat Bermanfaat

Informasi Kinerja

Tabel III.x
Capaian IKU B1.3 Indeks Respon Positif terhadap Informasi *Data Economic Intelligence/Market Intelligence* tentang Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks Respon Positif terhadap Informasi <i>Data Economic Intelligence/Market Intelligence</i> tentang Negara Akreditasi KBRI Kuwait City	Hasil Penilaian Indeks Respon Positif oleh Ditjen Amerop dan Ditjen Aspasaf	5 (skala 5)
Realisasi		5
Target		5
Capaian		120%
Batas Toleransi		N/A

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2023, realisasi IKU B1.3 Indeks Respon Positif terhadap Informasi *Data Economic Intelligence/Market Intelligence* tentang Negara Akreditasi KBRI Kuwait City adalah sebesar 5 atau Sangat Bermanfaat. Perhitungan capaian IKU B1.3 berbeda dengan IKU pada umumnya. Jika realisasi IKU mencapai indeks tertinggi sebesar 5 (Sangat Bermanfaat), maka capaian atas IKU B1.3 dikonversi menjadi 120%.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.x
Indeks Respon Positif terhadap Informasi *Data Economic Intelligence/Market Intelligence* tentang Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

IKU	2020			2021			2022			2023		
	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>C</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>C</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>C</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>C</i>
B1.3	4	5	120	5	5	120	5	5	120	5 ↑↓	5 ↑↓	120%

Dalam periode 2020-2023 realisasi IKU B1.3 Indeks Respon Positif terhadap Informasi *Data Economic Intelligence/Market Intelligence* tentang Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

meningkat secara signifikan dan berhasil dipertahankan pada nilai 5 (skala yaitu kategori Sangat Bermanfaat).

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Laporan Data Economic Intelligence (DEI) Perwakilan yang berisi observasi tahun sebelumnya telah disampaikan ke Pusat pada TW I tahun 2023 untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh Pusat. Nilai Indeks 5 (skala 5) diperoleh karena DEI disampaikan tepat waktu, sesuai format yang ditetapkan, dan memberi manfaat bagi stakeholders dengan ditindaklanjuti melalui partisipasi KBRI Kuwait City pada kegiatan Pameran Asian Bazar 2023.

Kendala dan Tantangan

Dalam menyusun DEI, update data perdagangan terlambat diperoleh, sehingga data perdagangan yang didapat pada bulan Desember 2022 hanya data per bulan Oktober 2022. Dengan demikian DEI yang disampaikan belum lengkap dan akan terus diperbaiki dengan informasi yang terakhir.

Demikian pula dengan data PMA (Kuwait) di Indonesia yang didapat dari sumber bebas sifatnya terbatas. Guna memperoleh data perdagangan dan data investasi yang terinci harus mengajukan permohonan secara tertulis dan resmi ke Bagian Pusat Data dari masing-masing kementerian terkait.

Upaya Perbaikan

Strategi atau langkah yang telah dilakukan oleh KBRI Kuwait adalah dengan: i) berlangganan berita ekonomi GCC berbayar secara online untuk mendapatkan data dan informasi serta peluang bisnis secara terkini, ii) menyampaikan perkembangan data dan mengikuti proses tindak lanjut dari hubungan bisnis yang difasilitasi.

Analisis Program Pendukung Capaian

Selain melalui pengumpulan dan analisis data melalui berbagai media tertulis dari *stakeholders* terkait atau platform data online, penyusunan DEI juga dapat didukung dengan cara pengumpulan data melalui survey pasar dan interview langsung di lapangan.

Proyeksi Kedepan

KBRI Kuwait City akan tetap mempertahankan nilai IKU ini untuk tetap berada pada indeks 5 (skala 5) yaitu kategori Sangat Bermanfaat

Learning and Growth Perspective

L1 Tata kelola organisasi KBRI Kuwait City yang baik

Sasaran strategis ini berfokus pada tata kelola yang merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarah, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan yang bersih.

Sasaran Strategis (SS) L1 diukur berdasarkan capaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Kuwait City.

Analisis IKU L1.1

Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Kuwait City

Deskripsi IKU

Nilai evaluasi AKIP KBRI Kuwait City merupakan nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan guna mencapai misi organisasi. Akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dituangkan secara rinci dalam laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Evaluasi AKIP di Kemenlu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal merujuk pada Keputusan Irjen Nomor 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Juknis Evaluasi AKIP di Lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI, yang mengacu pada Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi yang dilakukan meliputi 5 (lima) komponen dengan bobot sebagai berikut:

Hasil perhitungan dari komponen tersebut menghasilkan nilai akhir AKIP Satker yang diklasifikasikan sebagai berikut:

(1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan

(2) A (Skor > 80-90); Memuaskan

(3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik

(4) B (Skor > 60-70); Baik

(5) CC (>50-60); Cukup

(6) C (>30-50); Kurang

(7) D (0-30); Sangat Kurang

Pelaksanaan evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- Mengukur implementasi SAKIP pada Satker dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Satker.
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Untuk tahun 2023, klaim realisasi nilai AKIP menggunakan nilai yang tertuang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Jenderal Kemenlu atas implementasi SAKIP Satker tahun sebelumnya (2022).

Informasi Kinerja

Tabel III.x
Capaian IKU Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Kuwait City

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Kuwait City	Nilai evaluasi AKIP yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal, Kemenlu	76,55
Realisasi		76,55
Target		79,00
Capaian		96,90
Batas Toleransi <i>(opsional jika capaian melebihi 120%)</i>		N/A

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2023, realisasi IKU L1.1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Kuwait City adalah sebesar 76,55 atau masuk dalam kategori sangat baik.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.x
Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Kuwait City

IKU	2020			2021			2022			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
L1.1	78 (BB)	74,09 (BB)		78 (BB)	74,09 (BB)		79,5 (BB)	77,41 (BB)		79,00 ↓	76,55 ↓	96,90 %

Dalam periode 2020-2023 realisasi IKU L1.1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Kuwait City secara rata-rata mengalami peningkatan.

Perbandingan Kinerja dengan realisasi nasional

Tabel III.x
Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Kuwait City

IKU	2020		2021		2022		2023	
L1.1	Nilai KBRI	Rata2 Nasional	Nilai KBRI	Rata2 Nasional	Nilai KBRI	Rata2 Nasional	Nilai KBRI*	Rata2 Nasional*
	74,09	67,15	74,09	67,93	77,41	67,93*	76,55	67,93*

*menggunakan nilai 2022

Sumber: Laporan Kinerja KemenPANRB 2022

Realisasi IKU L1.1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Kuwait City tercatat di atas rata-rata nasional K/L tahun 2020-2023. Tren nilai evaluasi AKIP tahun 2020 - 2022 terlihat pada tabel menunjukkan bahwa nilai evaluasi AKIP KBRI Kuwait City sudah mencapai target dan nilai evaluasi AKIP KBRI Kuwait City selalu berada di atas rata-rata nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Berdasarkan laporan evaluasi implementasi AKIP KBRI Kuwait tahun 2020, KBRI Kuwait telah berupaya untuk melaksanakan rekomendasi terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang dituangkan dalam rencana aksi PK.

Kendala dan Tantangan

Walaupun tercatat nilai AKIP KBRI Kuwait City tahun 2020-2023 selalu berada di atas rata-rata nasional, namun nilai AKIP KBRI Kuwait City pada tahun 2023 tercatat menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan penyusunan dan implementasi dokumen AKIP, KBRI Kuwait telah melaksanakan kegiatan sesuai Renaksi sebagai berikut:

- **Melakukan koordinasi/rapat penyusunan dokumen AKIP KBRI Kuwait.** Hasil dari pelaksanaan rapat adalah tersusunnya dokumen Perencanaan Kinerja Kepala Perwakilan, dan seluruh Home Staff tahun 2022, Rencana Aksi Perencanaan Kinerja tahun 2021, Surat Keterangan Kepala Perwakilan tentang Peta Strategi KBRI Kuwait tahun 2021, Surat Keterangan Penunjukan MKP KBRI Kuwait tahun 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga KBRI Kuwait tahun 2022, dan penyusunan Rencana Kerja tahun anggaran 2022. Selanjutnya dokumen tersebut telah dipublikasikan pada website perwakilan <https://kemlu.go.id/kuwaitcity/id>
- **Berpartisipasi pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM** untuk pengelolaan dan penyusunan Renja dan RKA-K/L Satker dan Perwakilan TA 2022 secara virtual. Seluruh Home Staff KBRI mengikuti Bimtek penyusunan Renja dan RKA-K/L yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kemlu.
- **Berpartisipasi pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan dan penyusunan dokumen pelaporan anggaran.** Partisipasi yang dilakukan adalah kehadiran staf TU pada bimbingan teknis Pengadaan Jasa dan Barang yang diselenggarakan secara virtual
- **Melakukan koordinasi/rapat tindaklanjut evaluasi kinerja dan anggaran secara virtual,** kegiatan dilaksanakan setiap triwulan untuk menyiapkan Rencana Penarikan Dana (RPD) per triwulan, menghitung realisasi anggaran per triwulan dan sisa anggaran yang masih dapat dimanfaatkan.

Proyeksi Kedepan

KBRI Kuwait City akan menetapkan target nilai AKIP pada tahun selanjutnya di nilai yang realistis dan mungkin untuk dicapai, dengan terus berupaya untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

L2 Pengelolaan Aset KBRI Kuwait City yang Optimal

Aset berupa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berdasar dari perolehan lainnya yang sah.

Cakupan aset yang diukur dalam indeks ini adalah aset lancar berupa barang milik negara (BMN). Pengelolaan Aset dimaksud dalam sasaran strategis ini adalah proses perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMN yang berada di lingkungan Kemenlu. Proses ini diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dari Kementerian Keuangan (sesuai Permen PANRB No. 26 Tahun 2022).

Analisis IKU L2.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri

Deskripsi IKU

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah alat ukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai salah satu pendukung tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). IPA menjadi satu bagian pengukuran dari area perubahan reformasi pada penatalaksanaan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, proses dan prosedur kerja masing-masing K/L.

Merujuk Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020, terdapat 4 parameter dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Aset, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan Negara yang akuntabel dan produktif (20%)
 - a) Temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L (materialitas temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L dan temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L) dan
 - b) Realisasi PNB dari pengelolaan aset.
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan (25%)
 - a) Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN (ketepatan waktu penyampaian RKBMN, ketepatan waktu penyampaian LBP, ketepatan waktu penyampaian laporan Wasdal) dan
 - b) Asuransi BMN.
3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif (30%)
 - a) Tindak lanjut pengelolaan BMN (tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN, tindak lanjut terhadap BMN rusak berat) dan
 - b) Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN.
4. Administrasi BMN yang handal (25%)
 - a) Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan dan
 - b) Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

Parameter tersebut menghasilkan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dengan predikat sebagai berikut:

Skala 4 = penilaian sangat baik dengan nilai indeks sama dengan 4

Skala 3 = penilaian baik dengan nilai indeks kurang dari 4

Skala 2 = penilaian cukup dengan nilai indeks kurang dari 3

Skala 1 = penilaian buruk dengan nilai indeks kurang dari 2

IKU ini diadopsi untuk mendukung terwujudnya pengelolaan aset yang optimal dan akuntabel, sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai. Untuk tahun 2023, klaim realisasi nilai IPA menggunakan nilai yang tertuang Surat Kemenkeu kepada Kemenlu, yang memberikan nilai atas pengelolaan aset Kemenlu pada tahun sebelumnya (2022).

Informasi Kinerja

Tabel III.x
Capaian IKU L2.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	Nilai Pengelolaan Aset yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan	2,90
Realisasi		2,90
Target		2,90
Capaian		100
Batas Toleransi <i>(opsional jika capaian melebihi 120%)</i>		N/A

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Pada tahun 2023, realisasi IKU L2.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri adalah sebesar 2,90 (skala 4) dari target sebesar 2,90, sehingga capaian IKU sebesar [diisi capaian] dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.x
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IKU Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri

IKU	2022			2023		
	T	R	C	T	R	C
L2.1	2,7	2,86	105,93%	2,90 ↑	2,91 ↑	100,34%

--	--	--	--	--	--	--

IKU L2.1 baru diadopsi pada tahun 2022 sehingga capaian IKU di tahun 2023 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2022. Dalam periode 2022-2023 realisasi IKU L2.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri mengalami peningkatan yang signifikan.

Perbandingan Kinerja dengan Realisasi Nasional

Realisasi IKU L2.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri dengan perbandingan kinerja dengan realisasi nasional sebagai berikut:

Tabel III.x
Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri

IKU	2022		2023	
	Kemenlu	Rata2 Nasional	Kemenlu	Rata2 Nasional
L2.1	2,7	2,87*)	2,91	2,87*)

*) menggunakan nilai 2021, rata-rata nasional 2022 belum rilis

Sumber: Laporan Tahunan Kemenkeu 2021

file:///C:/Users/KEMLU/Downloads/LTKK%202021%20update%20preview.pdf

Realisasi IKU L2.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri tercatat *di bawah* rata-rata nasional K/L tahun 2022, namun telah *di atas* rata-rata nasional pada 2023. Tren Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri tahun 2022-2023 terlihat pada tabel menunjukkan bahwa nilai KBRI Kuwait City sudah mencapai target, dapat dilihat bahwa IKU L2.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri berada di atas rata-rata nasional.

Proyeksi Kedepan

KBRI Kuwait City akan menetapkan target nilai Indeks Pengelolaan Aset pada tahun selanjutnya di nilai yang realistis dan mungkin untuk dicapai sesuai dengan target Pusat, dengan terus berupaya untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

L3 Pengelolaan Anggaran KBRI Kuwait City yang Optimal dan Akuntabel

Infrastruktur diplomasi yang kuat ditopang oleh pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel. Pengelolaan anggaran merujuk pada rangkaian kegiatan yang dimulai dari penyusunan rencana kerja, penguangan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasi anggaran, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, hingga penyusunan Laporan Keuangan. Anggaran yang optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Analisis IKU L3.1 Nilai Kinerja Anggaran KBRI Kuwait City

Deskripsi IKU

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai capaian Kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga. NKA menjadi salah satu instrumen dalam penerapan mekanisme Penganggaran Berbasis Kinerja, yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan. NKA memantau 2 komponen, yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang dihasilkan oleh Aplikasi Monev Anggaran (SMART); dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui aplikasi OMSPAN.

Nilai Kinerja Anggaran menggabungkan Nilai EKA dan Nilai IKPA dengan bobot yang seimbang, masing-masing sebesar 50%. Pembobotan tersebut terus dievaluasi setiap tahun dan terus disesuaikan mempertimbangkan ketentuan yang terbaru. Komponen pembentuk pada masing-masing nilai adalah sebagai berikut:

Kriteria Pengukuran EKA SMART	Pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam tugas kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Kriteria Pengukuran IKPA	Terdapat 4 (empat) aspek pelaksanaan anggaran, yaitu Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan; Kepatuhan terhadap regulasi; Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan; serta Efisiensi pelaksanaan Kegiatan. Keempat aspek tersebut diukur melalui 12 (dua belas) indikator, yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Retur SP2D, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Kesalahan SPM, Perencanaan Kas.

Informasi Kinerja

Tabel III.x
Capaian IKU L3.1 Nilai Kinerja Anggaran KBRI Kuwait City

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai Kinerja Anggaran KBRI Kuwait City	50% Nilai EKA SMART	88,67
	50% Nilai IKPA	86,35
Realisasi		87,51
Target		90
Capaian		97,23
Batas Toleransi <i>(opsional jika capaian melebihi 120%)</i>		N/A

Sumber: Aplikasi SMART dan Aplikasi OMSPAN per 15 Januari 2024

Pada tahun 2023, realisasi IKU L3.1 Nilai Kinerja Anggaran KBRI Kuwait City adalah sebesar 87,51 dari target sebesar 90, sehingga capaian IKU sebesar 97,23. NKA diperoleh dari nilai EKA sebesar 88,67 dan nilai IKPA sebesar 86,35 dengan pembobotan masing-masing.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.x
Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IKU Nilai Kinerja Anggaran KBRI Kuwait City

IKU	2020			2021			2022			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
L3.1	91	93,16		92	81,9		92	81,9		90 ↓	87,51 ↑	97,23 %

Dalam periode 2020-2023 realisasi IKU L3.1 Nilai Kinerja Anggaran KBRI Kuwait City mengalami peningkatan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, target IKU L3.1 mengalami penurunan target menjadi 90 dari 92 pada tahun 2022. Penurunan target ini disebabkan oleh penilaian atas realisasi IKU tahun-tahun sebelumnya. Untuk realisasi IKU L3.1 mengalami peningkatan menjadi 87,51 dari 81,9 pada tahun 2022. Terdapat perubahan bobot pada NKA pada tahun 2023, dimana tahun 2022 dan sebelumnya NKA diperhitungkan dari bobot 60% nilai EKA SMART dan 40% nilai IKPA.

Perbandingan Kinerja dengan Realisasi Nasional

Realisasi IKU L3.1 Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari Nilai EKA SMART dan Nilai IKPA. Berikut perbandingan kinerja dengan realisasi nasional masing-masing komponen.

Tabel III.x
Perkembangan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran KBRI Kuwait City Tahun 2020 - 2023

<i>IKU</i>	<i>2020</i>		<i>2021</i>		<i>2022</i>		<i>2023</i>	
<i>L1.1</i>	<i>KBRI</i>	<i>Rata-Rata K/L</i>	<i>KBRI</i>	<i>Rata-Rata K/L</i>	<i>KBRI</i>	<i>Rata-Rata K/L</i>	<i>KBRI</i>	<i>Rata-Rata K/L*</i>
<i>EKA SMART</i>		79,6		93,17	77,22	94,46	88,67	94,46
<i>IKPA</i>		94,76		94,5	88,94	91,32	86,35	91,32

Sumber: Laporan Tahunan Kemenkeu 2022

* menggunakan nilai tahun 2022

Realisasi EKA SMART KBRI Kuwait City tercatat masih di bawah rata-rata nasional K/L tahun 2020-2023. Tren nilai EKA SMART tahun 2020 - 2022 terlihat pada tabel menunjukkan bahwa nilai KBRI belum mencapai target, dan masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai pada rata-rata nasional. Berdasarkan tabel dimaksud, dapat dilihat bahwa nilai KBRI berada di bawah rata-rata K/L.

Realisasi IKPA KBRI Kuwait City tercatat di bawah rata-rata nasional K/L tahun 2020-2023. Tren nilai IKPA tahun 2020 - 2022 terlihat pada tabel menunjukkan bahwa nilai KBRI belum mencapai target, dan masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai pada rata-rata nasional. Berdasarkan tabel dimaksud, dapat dilihat bahwa nilai KBRI berada di bawah rata-rata K/L.

III.2 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran KBRI Kuwait City pada tahun 2023 berdasarkan DIPA KBRI Kuwait City TA 2023 adalah sebesar Rp 30,241,791,000. Sepanjang tahun 2023, telah dilakukan Selama periode berjalan, Perwakilan RI Kuwait telah melakukan revisi sebanyak 4 kali Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya refocusing anggaran sehingga diperlukan revisi anggaran untuk optimalisasi dan adanya Anggaran Belanja Tambahan untuk keperluan belanja pegawai pada semester II dan juga melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS maupun valuta setempat. Pagu akhir KBRI Kuwait City adalah sebesar Rp 31,962,525,000.

KBRI Kuwait City telah mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2023 dengan realisasi mencapai 94,41% atau sebesar Rp30,177,123,701. Persentase realisasi tersebut meningkat sebanyak 1,81 poin jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran pada tahun 2022, yaitu sebesar 92,6%.

III.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sembilan indikator Kinerja Utama KBRI Kuwait City dicapai untuk mendukung pelaksanaan tiga program dengan metode pengelolaan kinerja berbasis anggaran, yaitu 1) Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri, dan 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri. Secara umum, capaian kinerja KBRI Kuwait City adalah 102,65 dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 87,51, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	19,128,890,000	18,648,491,426	97,49
2.	Belanja Barang	11,983,635,000	10,727,073,391	89,51
3.	Belanja Modal	850,000,000	801,558,384	94,30
Total		Rp 31,962,525,000	Rp 30,177,123,701	94,41

Catatan: Data realisasi anggaran menggunakan data monitoring per KRO di aplikasi SMART yang ditarik per tanggal 15 Januari 2023.

Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Saat ini, jumlah Pejabat dan Staff pada KBRI Kuwait City adalah 26 orang dengan rincian sebagai berikut:

Home Staff	Local Staff	Honorar	Perangkat Wisma	Jumlah
8	14	2	3	27

Dapat kami sampaikan bahwa pada periode 2023, terdapat penambahan 1 (satu) Pegawai Setempat melalui perekrutan secara terpusat. Tambahan PS tersebut saat ini mengisi posisi sebagai staff di Fungsi Protokol dan Konsuler.

Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Kepemilikan Gedung Kantor KBRI yang terletak di Daiya Blok I Rashed Ibn Ahmed Al-Roumi Street Building No. 2, Kuwait City, masih berstatus Sewa Kontrak dengan jangka waktu 5 tahun sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024, sedangkan Gedung Wisma Duta/Indonesia yang beralamat di Building House 25, St 1, block 1, Mishref, Kuwait, masih berstatus Sewa Kontrak selama 5 tahun mulai 1 Juli 2022 s.d. 1 Juni 2027.

Selain itu, hingga akhir tahun 2023, KBRI Kuwait City memiliki 10 (sepuluh) unit kendaraan dinas untuk mendukung operasional kegiatan-kegiatan KBRI dan melakukan pengadaan 1 kendaraan dinas senilai Rp 489,880,000. Sedangkan di bidang peralatan perkantoran, selama kurun waktu 2022 KBRI Kuwait City telah melakukan pengadaan perangkat pengelolaan data dan komunikasi Perwakilan sebanyak 29 unit dengan nilai total Rp. 131.076.622 dan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran Perwakilan sebanyak 65 unit dengan nilai total Rp. 182.415.638.

Berdasarkan realisasi anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum, Kegiatan Rincian Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal, DIPA Satker KBRI Kuwait tahun 2023 sebesar Rp30,177,123,701 dari total anggaran sebesar Rp 31,962,525,000 atau mencapai 94,41%.

BAB IV PENUTUP

Penutup

IV.1 Simpulan Umum Capaian Kinerja

Secara umum, pelaksanaan program kerja KBRI Kuwait City sepanjang tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun terdapat hambatan pada triwulan keempat tahun 2023. Pemerintah Kuwait memberlakukan larangan penyelenggaraan aktifitas publik yang bersifat kesenian, hiburan, dan kegiatan-kegiatan serupa yang mengumpulkan banyak massa, dikarenakan adanya aksi solidaritas dari Pemerintah Kuwait terhadap situasi politik di Palestina mulai pada bulan September 2023, dan dilanjutkan dengan masa berkabung atas berpungnya Amir Kuwait, Sheikh Nawaf, pada awal Desember 2023.

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) KBRI Kuwait City untuk tahun 2023 berdasarkan pada aplikasi Kinerja Kemlu (AKSI) mencapai 102,65.

IV.2 Kendala dan Tantangan

Secara umum dapat disampaikan kendala – kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing Sasaran Program pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

1. Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Kuwait City yang Optimal:

- Dengan semakin membaiknya kondisi global pasca Pandemi COVID-19, aktivitas ekonomi, investasi, dan pariwisata dari Kuwait ke Indonesia turut menunjukkan pemulihan. Salah satu hambatan utama yang saat ini masih dihadapi adalah tidak adanya penerbangan langsung dari Kuwait ke Indonesia.

2. Pelindungan WNI/BHI dan Pelayanan Publik KBRI Kuwait City yang Prima:

- Dalam pelaksanaan layanan kekonsuleran, di antara kendala yang dialami adalah gangguan pada jaringan SIMKIM yang terkadang memperlambat penyelesaian penerbitan visa dan paspor. Pada pelayanan warung Konsuler, tidak maksimal karena keterbatasan jam kerja para WNI dan izin pengguna jasa sehingga jumlah WNI yang hadir sangat terbatas dan lebih diutamakan pelayanan melalui loket konsuler KBRI.
- Dalam hal perlindungan kepada WNI, sistem kafalah dan wastah adalah hambatan utama lambatnya proses hukum yang dihadapi PMI.

3. Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Negara Kuwait, Diplomasi Polkam KBRI Kuwait City yang Kuat, Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya KBRI Kuwait City yang Kuat:

- Adapun **kendala** yang dihadapi adalah tersendatnya koordinasi dan komunikasi kepada pihak Kuwait dalam hal mengatur waktu kegiatan dan penyelesaian dokumen bersama. Internal pemerintah Kuwait memiliki prosedur yang tidak terafiliasi oleh satu bagian/departemen, dengan demikian KBRI Kuwait perlu ekstra keras untuk menghubungi setiap bagian terkait untuk kelancaran suatu kegiatan bersama kedua negara.

4. Tata Kelola Organisasi KBRI Kuwait City yang Baik, Sarana dan Prasarana KBRI Kuwait City yang Memadai dan Pengelolaan Anggaran KBRI Kuwait City yang Optimal:

- Permasalahan yang dialami oleh Perwakilan RI di Luar Negeri adalah nilai tukar kurs yang berfluktuatif. Dalam melaksanakan pengeluaran anggaran sepanjang tahun

anggaran, Perwakilan RI di Kuwait dihadapkan pada kemungkinan terjadinya selisih kurs anggaran, yang dapat menyebabkan potensi terjadinya kekurangan anggaran dibandingkan dengan rencana anggaran yang telah diajukan melalui RKAKL.

IV.3 Proyeksi Kedepan

Untuk langkah-langkah perbaikan mengatasi kendala tersebut di atas, KBRI Kuwait City pada tahun 2022 telah berusaha memberikan solusi-solusi dan inisiatif-inisiatif pemecahan masalah, antara lain sebagai berikut:

- A. Mengupayakan dibukanya kembali penerbangan langsung Kuwait Airways ke Indonesia.
- B. Mengupayakan dan memfasilitasi pertemuan bilateral dan perundingan bilateral baik G to G dan B to B secara virtual.
- C. Melanjutkan penjajakan dan pertemuan dengan berbagai stakeholders sesuai dengan proses yang sangat ketat dalam jumlah yang terbatas atau dilakukan melalui media *zoom meeting*.
- D. Melanjutkan kegiatan pameran/promosi budaya, pariwisata, dan produk Indonesia di Kuwait serta mendorong investasi Kuwait di Indonesia dengan memanfaatkan sosial media KBRI.
- E. Memberikan informasi terkait potensi dan peluang bisnis di Kuwait bagi para pemangku kepentingan terkait di Indonesia lebih intensif melalui zoom meeting, webinar dan berbagai media sosial KBRI Kuwait City.
- F. Selain mendistribusikan sembako, KBRI memberikan perlindungan 24/7 dan menyediakan hotline khusus sejak tahun 2020, khususnya kepada WNI terdampak Covid-19. Untuk perlindungan rutin kepada WNI/BHI dengan penanganan masalah/kasuskasus WNI secara cepat, tanggap, dan cermat serta bantuan hukum/kekonsuleran bagi kasus-kasus hukum serta pelayanan terbaik dalam menerbitkan dokumen keimigrasian.
- G. Menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan capaian kinerja. Sesuai arahan pimpinan, pelaksanaan kegiatan akan dioptimalkan pada semester pertama tahun 2023.
- H. Memperluas peluang penempatan tenaga kerja formal di Kuwait.



**DUTA BESAR LBBP
PERWAKILAN RI DI KUWAIT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Tri Tharyat
Jabatan : Duta Besar LBBP RI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

N a m a : Retno L.P. Marsudi
Jabatan : Menteri Luar Negeri

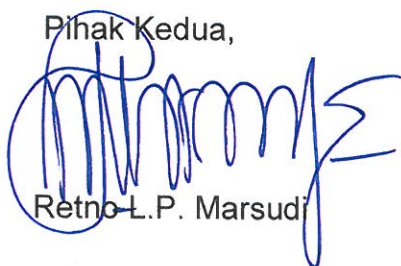
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuwait, Januari 2021

Pihak Kedua,



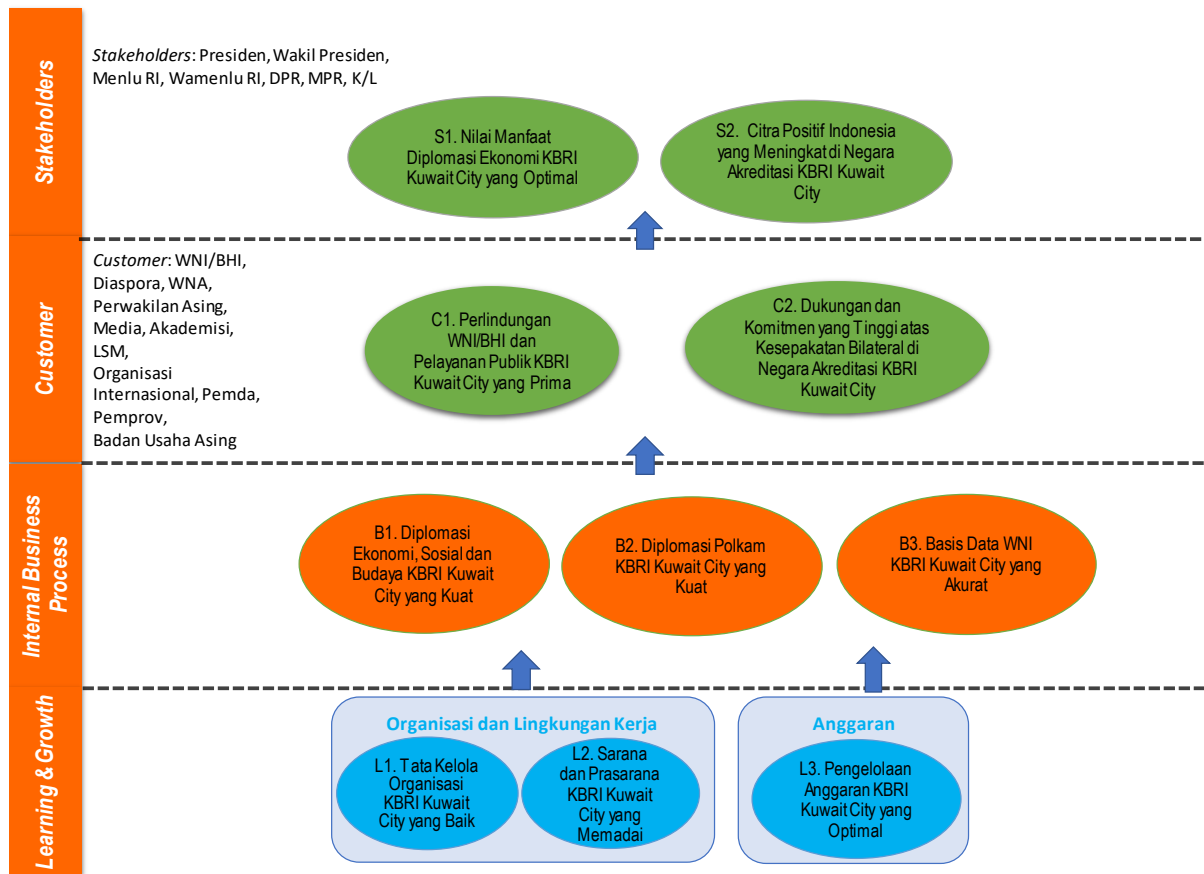
Retno L.P. Marsudi

Pihak Pertama,



Tri Tharyat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI KUWAIT CITY



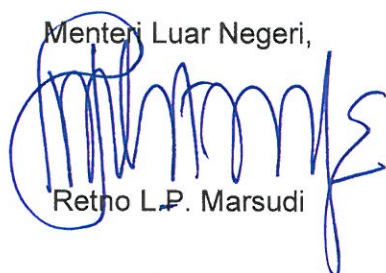
Kode SS	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stakeholders Perspective				
S1	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Kuwait City yang Optimal	IKU S.1.1	Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Kuwait	5%
		IKU S.1.2	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Indonesia ke Negara Kuwait	2%
		IKU S.1.3	Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dari Negara Kuwait	5%
S2	Citra Positif Indonesia yang Meningkat di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City	IKU S.2.1	Indeks Citra Indonesia di Negara Kuwait	3,85 (skala 5)
Customer Perspective				
C1	Perlindungan WNI/BHI dan Pelayanan Publik KBRI Kuwait City yang Prima	IKU C.1.1	Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Kuwait City yang diselesaikan	74%
		IKU C.1.2	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Kuwait City	4 (skala 4)
		IKU C.1.3	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI/BHI KBRI Kuwait City	4 (skala 4)

Kode SS	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C2	Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City	IKU C.2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan Bilateral Indonesia dengan Negara Kuwait	100%
Business Process Perspective				
B1	Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya KBRI Kuwait City yang Kuat	IKU B.1.1	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan, Budaya	3
		IKU B.1.2	Indeks Respon Positif <i>Stakeholders</i> terhadap Informasi <i>Data Economic Intelligence/Market Intelligence</i>	5 (Skala 5)
B2	Diplomasi Polkam KBRI Kuwait City yang kuat	IKU B.2.1	Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan di Bidang Diplomasi Polkam	1
B3	Basis Data WNI KBRI Kuwait City yang akurat	IKU B.3.1	Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Kuwait City yang terdaftar di Portal Peduli WNI	50%
Learning & Growth Perspective				
L1	Tata Kelola Organisasi KBRI Kuwait City yang Baik	IKU L.1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Kuwait City	79 (BB)
L2	Sarana dan Prasarana KBRI Kuwait City yang Memadai	IKU L.2.1	Persentase sarana dan prasarana KBRI Kuwait City yang dipenuhi sesuai dengan rencana	100%
L3	Pengelolaan Anggaran KBRI Kuwait City yang Optimal	IKU L.3.1	Nilai Kinerja Anggaran KBRI Kuwait City	91

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	31.044.857.000
2	Pelayanan dan Pelindungan WNI/BHI di Perwakilan RI	1.052.432.000
3	Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional di Perwakilan RI	1.858.754.000
Pagu Anggaran KBRI Kuwait City 2021		33.956.043.000,-

Kuwait, Januari 2021

Menteri Luar Negeri,



Retno L.P. Marsudi

Duta Besar LBBP RI



Tri Tharyat

**Matriks Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Perwakilan RI di Kuwait City
Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2021	Target (Akumulatif)				Rincian Kegiatan			
				s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	Uraian	Indikator <i>input/output</i>	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
S1	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Kuwait City yang Optimal	S1.1 Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Kuwait	5%	-	-	-	5%	Melakukan 1 kali pameran dagang di bidang perdagangan	Input: -SDM -Anggaran	Orang Rupiah	9 65.290.000
									Output: Jumlah Penawaran Ekspor Produk / Indonesia	Penawaran	5
								Penggalangan pengusaha Kuwait pada: 1. TEI 2. Hannover Messe 2021 3. Dubai Expo Januari-Desember 2021	Input: -SDM -Anggaran	Orang Rupiah	8 498.030.000
									Output: Jumlah hasil kesepakatan bisnis	Kesepakatan	5
								Forum Bisnis Indonesia – Kuwait, Kuwait April 2020	Input: -SDM -Anggaran	Orang Rupiah	20 76.707.000
									Output: Laporan Kegiatan	Dokumen	1
		S1.2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi	2%	-	-	-	2%	Promosi BUMN Indonesia bekerjasama dengan Lembaga	Input: -SDM -Anggaran	Orang Rupiah	5 84.971.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2021	Target (Akumulatif)				Rincian Kegiatan			
				s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	Uraian	Indikator <i>input/output</i>	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Indonesia ke Negara Akreditasi KBRI Kuwait City						terkait Indonesia dan Kuwait	Seminar Anggaran	Kegiatan	3
								Kuwait Maret - Desember 2020	Output: Laporan Kegiatan	Dokumen	3
								Memfasilitasi kunjungan pengusaha/investor Indonesia ke Kuwait	Input: -SDM -Anggaran	Orang Rupiah	15 13.724.000
								Indonesia, Februari -Desember 2020	Output: Jumlah pengusaha yang berminat berinvestasi yang dapat ditindaklanjuti	Orang	2
		S1.3 Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dari Negara Akreditasi KBRI Kuwait City	5%	-	-	-	5%	Partisipasi pada pameran pariwisata di Kuwait Januari-Desember 2021	Input: -SDM -Anggaran	Orang Rupiah	5 47.871.000
									Output: Jumlah kegiatan	Kegiatan	2
								Menyelenggarakan 1 kali <i>familiarization trip</i> /kunjungan jurnalistik Ke Indonesia Agustus - September 2020	Input: -SDM -Anggaran	Orang Rupiah	5 192.217.000
									Output: Jumlah kegiatan	Kegiatan	1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2021	Target (Akumulatif)				Rincian Kegiatan			
				s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	Uraian	Indikator <i>input/output</i>	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
S2	Citra Positif Indonesia yang Meningkatkan di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City	S2.1 Indeks Citra Indonesia di Negara Kuwait	3,85 (Skala 5)	-	-	-	3,85 (Skala 5)	Partisipasi pada festival promosi budaya di Kuwait Januari - Desember 2021	Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah responden yang mengisi survey	Orang Rupiah Jumlah responden	30 39.420.000 400
								Melakukan publikasi informasi tentang Indonesia di negara akreditasi KBRI Kuwait	Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah berita positif Indonesia di media setempat	Orang Rupiah Jumlah berita	6 0 10
								Melakukan kegiatan pengelolaan situs portal dan media sosial Perwakilan RI Kuwait, Januari – Desember 2021	Input: -SDM - Anggaran Output: Laporan pengelolaan	Orang Rupiah Dokumen	15 0 10
								Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan WNI Kuwait, Ahmadi, Jahra Januari – Desember 2021	Input: -SDM -Anggaran - Kegiatan Output: Jumlah masyarakat Indonesia yang dibina/diberdayakan	Orang Rupiah Kegiatan Orang	20 185.136.000 10 kali 1000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2021	Target (Akumulatif)				Rincian Kegiatan			
				s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	Uraian	Indikator <i>input/output</i>	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Menyelenggarakan upacara hari nasional Indonesia Kuwait Juli – Desember 2021	Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam upacara	Orang Rupiah Orang	25 71.116.000 50
C1	Perlindungan WNI/BHI dan Pelayanan Publik KBRI Kuwait City yang Prima	C1.1 Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Kuwait City yang diselesaikan	74%	50%	60%	65%	74%	Memberikan bantuan atau pendampingan hukum untuk WNI/BHI bermasalah korban penyiksaan fisik berat, evakuasi WNI (perang, bencana alam, penyakit,etc) Kuwait Januari-Desember 2021	Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah WNI yang diberikan bantuan tiket pemulangan	Orang Rupiah orang	2 218.097.000 43
								Memberikan bantuan/ pendampingan hukum untuk WNI/BHI bermasalah terlibat kasus perdata, keimigrasian, ketenagakerjaan, klaim asuransi, meninggal dunia	Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah Pendampingan	Orang Rupiah Pendampingan	3 136.712.000 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2021	Target (Akumulatif)				Rincian Kegiatan			
				s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	Uraian	Indikator <i>input/output</i>	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Januari – Desember 2020			
								Memberikan dukungan dan fasilitasi bantuan bagi WNIB di penampungan dan penjara Kuwait, Januari – Desember 2021	Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah WNIB di penampungan dan penjara yang difasilitasi	Orang Rupiah Orang	10 105.120.000 30
		C1.2 Nilai persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Kuwait	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Menyediakan bahan pendukung Pelayanan kekonsuleran Kuwait, Januari – Desember 2021	Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah bahan pendukung Pelayanan Notariat dan Orang	Orang Rupiah Paket	4 80.428.000 20
								Penataan Arsip Dokumen Kekonsuleran Kuwait, Juli-November 2021	Input: -SDM -Anggaran Output: Terlaksananya Penataan Arsip Dokumen Kekonsuleran	Orang Rupiah Kegiatan	5 0 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2021	Target (Akumulatif)				Rincian Kegiatan			
				s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	Uraian	Indikator <i>input/output</i>	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Melakukan survey kepuasan pelayanan kekonsuleran Ahmadi, Jahra, Farwaniya Juli, November 2021	Input: -SDM -Anggaran Output: Laporan hasil survey kepuasan pelayanan kekonsuleran	Orang Rupiah Laporan	4 163.635.000 2
								Pelaksanaan warung konsuler	Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah kegiatan	Orang Rupiah Laporan	8 208.369.000 4
		C1.3 Nilai persepsi Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI/BHI KBRI Kuwait City	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Melakukan survey kepuasan layanan perlindungan WNI/BHI Kuwait, Ahmadi, Jahra, Farwaniya	Input: -SDM -Anggaran Output: Laporan hasil survey kepuasan layanan perlindungan WNI/BHI	Orang Rupiah Laporan	4 76.261.000 4
								April, Juli, Oktober, Desember 2021			
C2	Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City	C2.1 Persentase tindak lanjut/ implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara	100%	-	-	100%	100%	Pelaksanaan SKB RI-Kuwait ke 2 Jakarta, September 2021	Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah kegiatan	Orang Rupiah kegiatan	3 43.946.000 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2021	Target (Akumulatif)				Rincian Kegiatan			
				s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	Uraian	Indikator <i>input/output</i>	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Akreditasi KBRI Kuwait City									
								Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI Selama 12 bulan	Input: SDM Anggaran Output: Laporan Pelaksanaan Kegiatan KEPPRI	Orang Rupiah Laporan	12 292.000.000 12
								Representasi Home Staff di Kuwait selama tahun 2021	Input: SDM Anggaran Output: Laporan pelaksanaan jamuan	Orang Rupiah Laporan	5 119.906.000 12
B1	Diplomasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya KBRI Kuwait City yang kuat	B.1.1 Jumlah Kesepakatan Di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	3	1	1	1	3	Memfasilitasi penyelesaian draft Perjanjian Perlindungan Penanaman Modal RI-Kuwait, Kuwait, Semester ke-2 2021	yang Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah Kegiatan	Orang Rupiah Laporan	5 0 2
								Memfasilitasi penyelesaian MoU Pertanian RI-Kuwait, Semester I 2021	Input: SDM Anggaran Output:	Orang Rupiah Laporan	2 0 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2021	Target (Akumulatif)				Rincian Kegiatan			
				s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	Uraian	Indikator <i>input/output</i>	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									Jumlah kegiatan		
								Memfasilitasi pelaksanaan 2nd Joint Trade committee Kuwait, Oktober 2021	Input: SDM Anggaran Output: Laporan Kegiatan	Orang Rupiah Dokumen	2 0 1
								Penyusunan Database Riset Pasar Kuwait, Januari 2021	Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah data economic intelligence	Orang Rupiah Dokumen	5 43.449.000
		B1. 2 Indeks Respon Positif terhadap Informasi Data Economic Intelligence KBRI Kuwait City	5 (skala 5)	-	-	5 (skala 5)	5 (skala 5)	Melakukan market survey kepada pemangku kepentingan perdagangan terkait Kuwait	Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah data economic Intelligence yang dipublikasikan	Orang Rupiah Dokumen	12 84.971.000 2
B2	Diplomasi Polkam KBRI Kuwait City yang Kuat	B1.1 Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan di Bidang	1	-	-	1	1	Memfasilitasi kerjasama KPK dan Nazaha Kuwait Kuwait – Indonesia April-Desember	Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah kegiatan	Orang Rupiah laporan	3 0 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2021	Target (Akumulatif)				Rincian Kegiatan			
				s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	Uraian	Indikator <i>input/output</i>	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Diplomasi Polkam						2021			
								Memfasilitasi kerjasama penanggulangan terorisme	Input: SDM Anggaran	Orang Rupiah	4 0
								Semester ke-2 2021	Output: Jumlah kegiatan	laporan	1
B3	Basis Data WNI KBRI Kuwait City yang Akurat	B3.1 Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Kuwait City yang terdaftar di Portal Peduli WNI	50%	15%	15%	35%	50%	Reachout pendataan WNI di kantong-kantong masyarakat Indonesia di wilayah kerja KBRI Kuwait City, Ahmadi, Jahra Januari – Desember 2021	Input: -SDM -Anggaran Output: Data WNI yang terverifikasi	Orang Rupiah Orang	4 31.905.000 1.320
								Koordinasi dengan otoritas setempat untuk mendapatkan benchmark data WNI di wilayah kerja KBRI Kuwait City	Input: - SDM - Anggaran Output: Jumlah laporan yang disusun	Orang Rupiah Dokumen	3 31.905.000 2
L1	Tata Kelola Organisasi KBRI Kuwait City yang Baik	L1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI	79 (BB)	-	-	79 (BB)	79 (BB)	Melakukan koordinasi/rapat penyusunan dokumen AKIP KBRI Kuwait City, Kuwait Januari –	Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah dokumen AKIP yang disusun	Orang Rupiah Dokumen	60 0 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2021	Target (Akumulatif)				Rincian Kegiatan			
				s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	Uraian	Indikator <i>input/output</i>	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kuwait						Desember 2021			
								Berpartisipasi pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan dan penyusunan dokumen AKIP	Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah SDM yang berpartisipasi	Orang Rupiah Orang	3 0 3
								Berpartisipasi pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan dan penyusunan dokumen pelaporan anggaran Kuwait – Indonesia, Januari – Desember 2021	Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah SDM yang berpartisipasi	Orang Rupiah Orang	3 0 3
								Berpartisipasi pada Pelatihan Sandi Jakarta, Singapura Agustus-November 2021	Input: -SDM -Anggaran Output: Jumlah SDM yang berpartisipasi	Orang Rupiah Orang	1 221.213.000 2
L2	Sarana dan Prasarana KBRI Kuwait City yang Memadai	L2.1 Persentase Sarana dan Prasarana	100%	25%	50%	75%	100%	Melakukan Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan	Input: -SDM -Anggaran	Orang Rupiah	3 841.014.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2021	Target (Akumulatif)				Rincian Kegiatan			
				s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	Uraian	Indikator <i>input/output</i>	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		KBRI Kuwait City yang Dipenuhi Sesuai dengan Rencana						Prasarana (peralatan dan mesin, dan data informasi) Kuwait, Februari – Desember 2020	Output: Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	unit	33
L3	Pengelolaan Anggaran KBRI Kuwait yang Optimal	L3.1 Nilai Kinerja Anggaran KBRI Kuwait City	91	40	60	75	91	Menyelenggarakan dukungan administrasi dan perkantoran Kuwait, Januari – Desember 2020	Input: -SDM -Anggaran Output : Jumlah kegiatan administrasi dan operasional perkantoran yang terealisasi	Orang Rupiah Layanan	31 30.823.644.000 2
TOTAL ANGGARAN										Rp. 33.956.043.000	



SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DI KUWAIT CITY

NOMOR: **006A/SK/KEPPRI/I/2021**

TENTANG

PETA STRATEGI DAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERWAKILAN RI KUWAIT CITY TAHUN 2021

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA KUWAIT

- Menimbang :
- a. bahwa Tujuan dan Sasaran Strategis perlu diterjemahkan kedalam peta strategi yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut atas telah ditetapkannya Perjanjian Kinerja (PK) Perwakilan RI Kuwait City Tahun 2021, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan pada SK Kepala Perwakilan RI Nomor **002A/SK-MKP/KEPPRI/I/2020** Tahun 2020 Tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Perwakilan RI Kuwait City Tahun 2020.
 - c. bahwa sebagai pedoman dan informasi menyeluruh terkait IKU Perwakilan RI Kuwait City, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI tentang Peta Strategi dan IKU Perwakilan RI Kuwait City dengan penjelasan komprehensif yang tertuang dalam Manual IKU Perwakilan RI Kuwait City
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

3. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

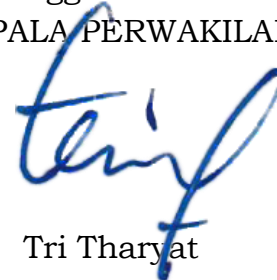
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA KUWAIT CITY TAHUN 2021
- KESATU : Memberlakukan Peta Strategi/Sasaran Strategis dan IKU Perwakilan RI Kuwait City sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Perwakilan RI Kuwait City Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Strategi dan IKU tersebut digunakan sebagai tolak ukur kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Perwakilan RI Kuwait City dan acuan dalam dokumen perencanaan kinerja dan anggaran serta evaluasi kinerja dan anggaran Perwakilan RI Kuwait City
- KETIGA : Memberlakukan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan RI Kuwait City sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai dokumen acuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perwakilan RI Kuwait City
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada seluruh Fungsi di lingkungan Perwakilan RI Kuwait City untuk:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKU di lingkungan Perwakilan RI sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.
- b. Menyiapkan data target, realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai bagi penanggung jawab atau pihak penyedia data yang memiliki kontribusi atas IKU Perwakilan RI Kuwait City dan Kementerian Luar Negeri.

- KELIMA : Manajer Kinerja Perwakilan bersama-sama dengan seluruh unsur Perwakilan RI memantau dan mengevaluasi realisasi serta capaian kinerja IKU Perwakilan RI bersama Kepala Perwakilan RI sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Perwakilan RI Nomor **002A/SK-MKP/KEPPRI/I/2020** Tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama di Perwakilan RI Kuwait City dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuwait
Pada tanggal 31 Januari 2021
KEPALA PERWAKILAN RI

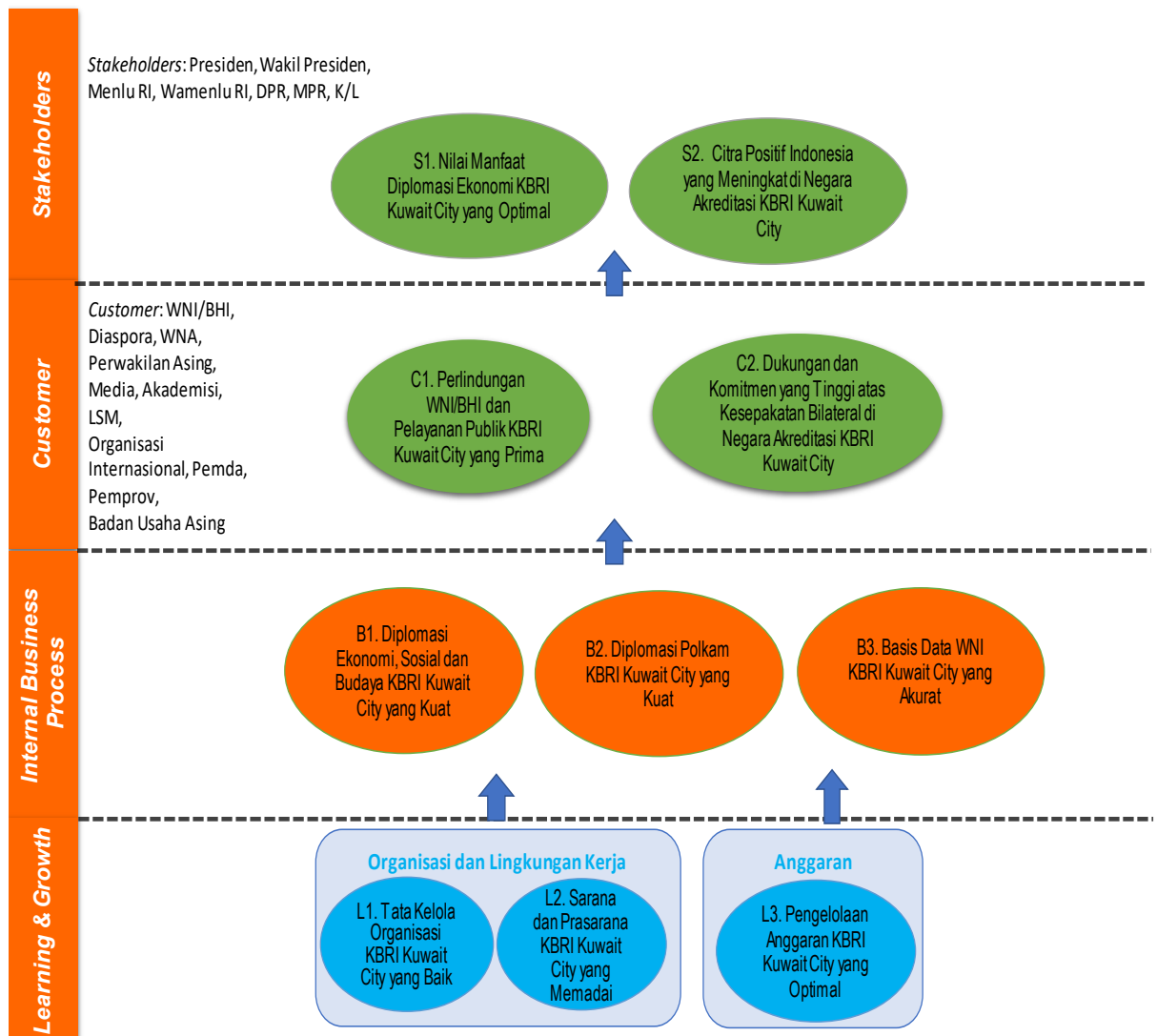


Tri Tharyat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI
NOMOR 006A/SK/KEPPRI/I/2021
TENTANG PETA STRATEGI DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
PERWAKILAN RI KUWAIT CITY

LAMPIRAN I:

**PETA STRATEGI
PERWAKILAN RI KUWAIT CITY TAHUN 2021**



LAMPIRAN II:

**MATRIKS PROYEKSI TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA RI KBRI KUWAIT CITY
TAHUN 2021-2025**

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Proyeksi Target			
					Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Stakeholders Perspective								
S.1	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Kuwait City yang Optimal	S.1.1	Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Kuwait	5%	6%	6%	6%	7%
		S.1.2	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Indonesia ke Negara Kuwait	2%	2%	3%	3%	4%
		S.1.3	Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dari Negara Kuwait	5%	6%	6%	6%	7%
S/2	Citra Positif Indonesia yang Meningkat di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City	S.2.1	Indeks Citra Indonesia di Negara Kuwait	3,85 (skala 4)	3,9 (skala 4)	3,95 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
Customer Perspective								
C.1	Pelindungan WNI/BHI dan Pelayanan Publik KBRI Kuwait City yang Prima	C.1.1	Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Kuwait City yang diselesaikan	74%	75%	76%	77%	78%
		C.1.2	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Kuwait City	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
		C.1.3	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI/BHI KBRI Kuwait City	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Proyeksi Target			
					Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
C.2	Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City	C.2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan Bilateral Indonesia dengan Negara Kuwait	100%	100%	100%	100%	100%
Internal Business Process Perspective								
B.1	Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya KBRI Kuwait City yang Kuat	B.1.1	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan, Budaya	3	3	3	3	3
		B.1.2	Indeks Respon Positif terhadap Informasi <i>Data Economic Intelligence/Market Intelligence</i>	5 (skala 5)	5 (skala 5)	5 (skala 5)	5 (skala 5)	5 (skala 5)
B.2	Diplomasi Polkam KBRI Kuwait City yang kuat	B.2.1	Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan di Bidang Diplomasi Polkam	1	1	1	1	1
B.3	Basis Data WNI KBRI Kuwait City yang akurat	B.3.1	Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Kuwait City yang terdaftar di Portal Peduli WNI	50%	70%	80%	100%	100%
Learning and Growth Perspective								
L.1	Tata Kelola Organisasi KBRI Kuwait City yang Baik	L.1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Kuwait City	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	83 (A)
L.2	Sarana dan Prasarana KBRI Kuwait City yang Memadai	L.2.1	Persentase sarana dan prasarana KBRI Kuwait City yang dipenuhi sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%
L.3	Pengelolaan Anggaran KBRI Kuwait City yang Optimal	L.3.1	Nilai Kinerja Anggaran KBRI Kuwait City	91	92	93	94	95

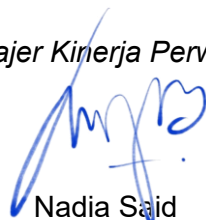
**LEMBAR PENETAPAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Bersama ini ditetapkan manual IKU Kepala Perwakilan RI Kuwait City untuk periode Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang meliputi:

- a. Persentase peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara Kuwait
- b. Persentase peningkatan nilai investasi Indonesia ke negara Kuwait
- c. Persentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia dari negara Kuwait
- d. Indeks citra Indonesia di negara Kuwait
- e. Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Kuwait City yang diselesaikan
- f. Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Kuwait City
- g. Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI/BHI KBRI Kuwait City
- h. Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara Kuwait
- i. Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya
- j. Indeks respon positif terhadap informasi data *Economic Intelligence/Market Intelligence*
- k. Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi polkam
- l. Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Kuwait City yang terdaftar di portal peduli WNI
- m. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Kuwait City
- n. Persentase sarana dan prasarana KBRI Kuwait City yang dipenuhi sesuai dengan rencana
- o. Nilai kinerja anggaran KBRI Kuwait City

Ditetapkan di Kuwait City
31 Januari 2021

(Manajer Kinerja Perwakilan)



Nadia Said

19811226 200603 2 001

Kepala Perwakilan RI



Tri Tharyat

(FORM MANUAL IKU)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

S1

Perspektif:	Stakeholders Perspective				
Sasaran Strategis:	Nilai manfaat diplomasi ekonomi KBRI Kuwait City yang optimal				
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Latar belakang: Sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Perwakilan RI serta amanat kinerja dari Presiden RI, capaian kinerja diplomasi ekonomi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan, investasi, dan wisatawan mancanegara. Hal ini ditujukan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal merupakan jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang paling menguntungkan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara.</p>				
Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City				
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	<p>Definisi: Persentase Peningkatan: kenaikan nilai perdagangan dari tahun sebelumnya sesuai target yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Negara akreditasi adalah tempat kedudukan RI beserta negara/wilayah kerja rangkapan serta organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah RI. Nilai Perdagangan: Nilai ekspor Indonesia ditambah dengan nilai impor (Barang dan jasa) Indonesia yang diperoleh dari Kemendag atau BPS. Data diperoleh dari Januari - Oktober tahun berjalan.</p> <p>Formula:</p> $\frac{(\text{Data Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Akreditasi/wilayah kerja Periode saat ini} - \text{Data Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Akreditasi/wilayah kerja Periode tahun sebelumnya})}{\text{Data Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Akreditasi/wilayah kerja Periode tahun sebelumnya}} \times 100\%$ <p><i>Jika Perwakilan RI melingkupi beberapa negara maka dirata-ratakan</i></p> <p>Tujuan: Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kemenlu bertekad untuk meningkatkan peran Perwakilan RI guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara akreditasi melalui berbagai macam kegiatan promosi dagang, dll.</p>				
Satuan Pengukuran :	Persentase				
Tingkat Kendali IKU :	() High () Moderate (X) Low				
Tingkat Validitas IKU :	(X) Exact () Proxy () Activity				
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Ekonomi				
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Ekonomi				
Sumber Data :	Diutamakan Nilai Perdagangan yang diterbitkan oleh Kemendag atau BPS (jika data utama tidak ada, maka dapat menggunakan data dari lembaga statistik resmi di negara akreditasi/wilayah kerja dengan dikonversi dalam mata uang USD).				
Jenis Cascading IKU:	(X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading				
Metode Cascading :	() Direct (X) Indirect				
Jenis Konsolidasi Periode :	() Sum () Average (X) Take Last Known Value				
Jenis Konsolidasi Lokasi :	() Sum () Average (X) Raw data				
Polarisasi Indikator Kinerja :	(X) Maximize () Minimize () Stabilize				
Periode Pelaporan :	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan				

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	10%	32%	5%	0	5%

Indikator Kinerja Utama:

IKU-2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Indonesia ke Negara Akreditasi KBRI Kuwait

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Persentase Peningkatan: persentase peningkatan dari tahun sebelumnya sesuai target yang ditetapkan Perwakilan RI.
 Negara akreditasi adalah tempat kedudukan RI beserta negara/wilayah kerja rangkaian serta organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah RI.
 Nilai Investasi Indonesia: Nilai Penanaman Modal Indonesia ke negara akreditasi dalam kurun waktu satu tahun.

Formula:

$$\frac{(\text{Data Nilai investasi Indonesia ke Negara Akreditasi KBRI Kuwait saat ini} - \text{Data Nilai investasi Indonesia ke Negara Akreditasi Periode tahun sebelumnya})}{\text{Data Nilai investasi Indonesia ke Negara Akreditasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Jika Perwakilan RI melingkupi beberapa negara maka dirata-ratakan

Tujuan:

Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kemenlu bertekad untuk meningkatkan peran Perwakilan RI guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai investasi Indonesia ke negara akreditasi

Satuan Pengukuran :

Persentase

Tingkat Kendali IKU :

☐ High
 ☒ Moderate
 ☐ Low

Tingkat Validitas IKU :

☒ Exact
 ☐ Proxy
 ☐ Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Fungsi Ekonomi.

Unit/Pihak Penyedia Data :

Fungsi Ekonomi

Sumber Data :

Diutamakan Nilai Investasi yang diterbitkan oleh BKPM atau BPS (jika data utama tidak ada, maka dapat menggunakan data dari lembaga statistik resmi di negara akreditasi/wilayah kerja dengan dikonversi dalam mata uang USD).

Jenis Cascading IKU:

☐ Cascading Peta
 ☐ Cascading Non peta
 ☒ Non-Cascading

Metode Cascading :

☐ Direct
 ☐ Indirect

Jenis Konsolidasi Periode :

☐ Sum
 ☐ Average
 ☒ Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi :

☐ Sum
 ☐ Average
 ☐ Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja :

☒ Maximize
 ☐ Minimize
 ☐ Stabilize

Periode Pelaporan :

☐ Bulanan
 ☐ Triwulanan
 ☐ Semesteran
 ☒ Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	10%	N/A	N/A	N/A	2%

Catatan: IKU ini baru digunakan di tahun 2019, tahun 2020 IKU ini tidak di ambil

Indikator Kinerja Utama:

IKU-3 Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dari Negara Akreditasi KBRI Kuwait City

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Persentase Peningkatan: penambahan jumlah dari tahun sebelumnya sesuai target yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri.

Formula:

$$\frac{(\text{Data wisatawan mancanegara dari Negara Akreditasi/wilayah kerja Periode saat Ini} - \text{Data wisatawan Data wisatawan mancanegara dari Negara Akreditasi/wilayah kerja Periode yang lalu})}{\text{Data wisatawan mancanegara dari Negara Akreditasi/wilayah kerja Periode yang lalu}} \times 100\%$$

Jika Perwakilan RI melingkupi beberapa negara maka dirata-ratakan

Tujuan:

Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kemenlu bertekad untuk meningkatkan peran Perwakilan RI guna memberikan kontribusi lebih

Satuan Pengukuran :

persentase

Tingkat Kendali IKU :

☐ High
 ☒ Moderate
 ☐ Low

Tingkat Validitas IKU :

☒ Exact
 ☐ Proxy
 ☐ Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Fungsi Ekonomi dan Fungsi Sosbud

Unit/Pihak Penyedia Data :

Fungsi Ekonomi dan Fungsi Sosbud

Sumber Data :

Data Publikasi oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata (jika data utama tidak ada, maka data dapat menggunakan Ditjen Imigrasi)

Jenis Cascading IKU:

☒ Cascading Peta
 ☐ Cascading Non peta
 ☐ Non-Cascading

Metode Cascading :

☐ Direct
 ☒ Indirect

Jenis Konsolidasi Periode :

☐ Sum
 ☐ Average
 ☒ Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi :

☐ Sum
 ☐ Average
 ☒ Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja :

☒ Maximize
 ☐ Minimize
 ☐ Stabilize

Periode Pelaporan :

☐ Bulanan
 ☐ Triwulanan
 ☐ Semesteran
 ☒ Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	60%	10.85%	5%	0	5%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

S2

Perspektif:	Stakeholders Perspective																					
Sasaran Strategis:	Citra Positif Indonesia yang Meningkat di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City																					
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Citra positif Indonesia adalah persepsi yang dipercayai/diyakini aktor lain terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan internasional, pola perilaku tersebut terbangun berdasarkan power yang dimiliki baik yang bersifat hard maupun soft, citra dalam hal ini dapat bersifat positif maupun negatif. Citra juga merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, sehingga dapat menempatkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam berbagai aspek kehidupan.</p> <p>Negara Akreditasi/wilayah kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI beserta negara/wilayah kerja rangkapan serta organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI.</p>																					
Indikator Kinerja Utama:	IKU 1: Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City																					
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	<p>Definisi:</p> <p>Indeks Citra: Indeks yang mengukur kesan ataupun pandangan dunia internasional terhadap negara Indonesia di dunia internasional</p> <p>Dalam mengukur citra sebuah negara dapat diukur melalui 6 dimensi utama yaitu: pariwisata, export, tata kelola pemerintahan, investasi dan imigrasi, budaya dan masyarakat. (lihat Nadia Kaneva, 2011, "Nation Branding: Toward an Agenda for Critical Research, dalam International Journal of Communication Vol 5 (2011), 117-141)</p> <p>Indeks Citra Indonesia diperoleh berdasarkan survey dengan menggunakan model Simon Anholt yang mengukur 6 dimensi (Governance; Investment and Immigration; Export; Tourism; Culture dan People) dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden.</p> <p>Responden adalah non WNI yang berada di negara/wilayah akreditasi dengan minimal jumlah responden sebanyak 50 responden. Responden tersebut berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, pemerintah, parlemen, media, LSM, masyarakat umum setempat, serta counterpart terkait lainnya.</p> <p>Ruang Lingkup:</p> <p>Indeks citra positif Indonesia diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala 0 s/d 5</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interval</th> <th>Kategori Indeks</th> <th>Skala Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 16,67</td> <td>Sangat Buruk</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16,68 - 35,35</td> <td>Buruk</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>35,36 - 50,01</td> <td>Cukup Buruk</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>50,02 - 66,68</td> <td>Cukup Baik</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>66,69 - 83,35</td> <td>Baik</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>83,36 - 100</td> <td>Sangat Baik</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Formula:</p> <p>Indeks hasil survei terhadap citra Indonesia</p> <p>Tujuan:</p> <p>Untuk mengukur sampai sejauh mana citra positif Indonesia di negara akreditasi/wilayah kerja</p>	Interval	Kategori Indeks	Skala Indeks	0 - 16,67	Sangat Buruk	0	16,68 - 35,35	Buruk	1	35,36 - 50,01	Cukup Buruk	2	50,02 - 66,68	Cukup Baik	3	66,69 - 83,35	Baik	4	83,36 - 100	Sangat Baik	5
Interval	Kategori Indeks	Skala Indeks																				
0 - 16,67	Sangat Buruk	0																				
16,68 - 35,35	Buruk	1																				
35,36 - 50,01	Cukup Buruk	2																				
50,02 - 66,68	Cukup Baik	3																				
66,69 - 83,35	Baik	4																				
83,36 - 100	Sangat Baik	5																				
Satuan Pengukuran :	Indeks																					
Tingkat Kendali IKU :	() High () Moderate (X) Low																					
Tingkat Validitas IKU :	(X) Exact () Proxy () Activity																					
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Pensosbud																					
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Pensosbud																					
Sumber Data :	Hasil olah data kuesioner indeks citra Indonesia, dengan menggunakan database website melalui tautan https://citraindonesia.kemlu.go.id																					
Jenis Cascading IKU:	(X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading																					
Metode Cascading :	() Direct (X) Indirect																					
Jenis Konsolidasi Periode :	() Sum () Average (X) Take Last Known Value																					
Jenis Konsolidasi Lokasi :	() Sum () Average (X) Raw data																					
Polarisasi Indikator Kinerja :	(X) Maximize () Minimize () Stabilize																					
Periode Pelaporan :	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan																					

Tabel Data :	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	4 (skala 5)	3,63 (skala 5)	3,8 (skala 5)	3,93 (skala 5)	3,85 (Skala 5)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

C1

Perspektif:	Customer Perspective
Sasaran Strategis:	Pelindungan WNI/BHI dan Pelayanan Publik KBRI Kuwait City yang Prima
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Pelindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI dan BHI di luar negeri termasuk penyediaan bantuan informasi hukum dan/atau sosial dengan memperhatikan prinsip mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI; dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum negara setempat serta hukum dan kebiasaan internasional.</p> <p>Sumber: Permenlu No 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di luar negeri</p> <p>WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.</p> <p>Ruang lingkup: WNI dalam hal ini adalah yang berkedudukan di luar negeri.</p> <p>Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Perwakilan RI.</p> <p>Sumber: UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Prima adalah sangat baik; utama.</p> <p>Latar Belakang:</p> <p>Pemberian pelayanan publik oleh aparat pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat sehingga kedudukan aparat pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.</p>
Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	<p>Definisi:</p> <p>Kasus WNI di luar negeri meliputi antara lain: kasus hukuman mati, terorisme, radikalisme, penyanderaan, pembunuhan, penyiagaan fisik berat, pemerkosaan, TPPO, narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam, kecelakaan pesawat/kapal laut, amnesti), keimigrasian, ketenagakerjaan, klaim asuransi, meninggal dunia (sakit, kecelakaan lalu lintas), pencurian, pencucian uang, dan berbagai kasus pidana dan perdata lainnya.</p> <p>Disamping itu, terdapat kasus yang bersifat insidentil dan/atau massive yang memiliki ramifikasi yang cukup luas secara politis, ketertiban masyarakat, dan keselamatan jiwa WNI.</p> <p>Kasus yang selesai (KS) adalah kasus yang telah ditangani sesuai dengan ketentuan hukum nasional; hukum negara setempat; dan/atau hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku terkait pemenuhan hak-hak WNI di luar negeri.</p> <p>Kasus yang ditangani (KT) adalah kasus yang dihadapi oleh WNI di luar negeri sesuai dengan pengaduan, laporan, atau pun pemberitaan serta informasi yang diterima dari berbagai pihak, yang termasuk dalam lingkup pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri.</p> <p>Penghitungan jumlah kasus tidak didasarkan pada jumlah WNI/BHI yang mengadukan, memohon bantuan atau terlibat kasus, melainkan jumlah masalah atau kasus yang ditangani. Satu orang WNI dapat mengalami beberapa kasus yang berbeda, contohnya: apabila terdapat pengaduan seorang WNI yang mengalami kekerasan fisik oleh majikan, gaji yang tidak dibayar, dan izin tinggal yang tidak diperpanjang, maka WNI tersebut memiliki 3 kasus yang berbeda. Pembedaan kasus diperlukan mengingat penanganan kasus-kasus tersebut didasarkan oleh prosedur/SOP, peraturan nasional, setempat dan internasional yang berbeda dengan target penyelesaian yang berbeda juga. Penyelesaian 3 kasus tersebut dapat terjadi tidak bersamaan karena terkait dengan pihak-pihak lain, seperti: pihak kepolisian, imigrasi, dan Kemenlu di Indonesia dan negara setempat.</p> <p>Kasus yang ditangani pada tahun berjalan adalah sisa kasus dari tahun sebelumnya. Apabila ada kasus yang tidak selesai pada tahun berjalan, kasus yang tidak selesai tersebut akan dihitung pada tahun berikutnya.</p> <p>IKU Persentase penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negeri di luar negeri, terdiri dari 2 unsur, yaitu:</p> <p>Unsur 1: Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan. Bobot: 65%</p> <p>Unsur 2: Persentase Kasus Umum yang diselesaikan. Bobot: 35%</p> <p>Kasus Khusus meliputi/mencakup/terdiri dari namun tidak terbatas pada kasus WNI/BHI di luar negeri yang termasuk dalam kategori high profile case (kasus hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiagaan fisik berat, korban TPPO, kasus narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam, kecelakaan pesawat/kapal laut, amnesti) serta kasus yang bersifat insidentil dan/atau massive yang memiliki ramifikasi yang cukup luas secara politis, ketertiban masyarakat, dan keselamatan jiwa WNI.</p> <p>Kasus Umum merupakan kasus di luar Kasus Khusus antara lain meliputi/mencakup/terdiri dari kasus perdata, keimigrasian, ketenagakerjaan, klaim asuransi, meninggal dunia (sakit, kecelakaan lalu lintas), pencurian, pencucian uang, pemerkosaan, dan pelanggaran hukum.</p> <p>*Perwakilan dapat menghapus Kasus Khusus apabila tidak terdapat Kasus Khusus di Negara Akreditasinya.</p> <p>Unsur 1 dibobotkan lebih tinggi karena tingkat urgensi, kompleksitas, dan sumber daya dalam penanganan dalam penyelesaian kasus khusus lebih tinggi dibanding kasus umum.</p> <p>Formula:</p> <p>(Jumlah kasus khusus dan/atau jumlah kasus umum WNI yang diselesaikan) dibagi dengan total kasus WNI yang ditangani</p> <p>Tujuan:</p> <p>Mengukur tingkat capaian penyelesaian kasus-kasus WNI di luar negeri</p>
Satuan Pengukuran :	Indeks
Tingkat Kendali IKU :	() High (X) Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU :	(X) Exact () Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Konsuler Perwakilan RI
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Konsuler Perwakilan RI
Sumber Data :	Laporan penanganan kasus, database Portal Peduli WNI, dan Berita Acara Serah Terima Penanganan Kasus
Jenis Cascading IKU:	(X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading
Metode Cascading :	() Direct (X) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	() Sum (X) Average () Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi :	() Sum () Average (X) Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja :	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	100%	102%	73%	100%	74%
s.d TRIWULAN I	60%	66%	50%	50%	50%
s.d TRIWULAN II	70%	83%	60%	60%	60%
s.d TRIWULAN III	80%	92%	65%	65%	65%
s.d TRIWULAN IV	100%	102%	73%	100%	74%

Indikator Kinerja Utama:	IKU-2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Kuwait City
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	<p>Definisi:</p> <p>Kepuasan pelayanan adalah kondisi dimana pelayanan yang diterima sesuai dan/atau lebih baik daripada yang diharapkan oleh penerima jasa. Pelayanan Kekonsuleran adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan Perwakilan RI dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh hukum nasional dengan memperhatikan hukum negara setempat serta kebiasaan dan hukum internasional yang mencakup, namun tdk terbatas pada layanan kependudukan, notariat, kehakiman, keimigrasian, dan ketenagakerjaan.</p> <p>Sumber: UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Penyampaian survey diberikan kepada responden per pelayanan. Hasil penilaian kuesioner/survey yang diambil merupakan akumulasi survey hingga periode berjalan, contoh: hasil penilaian survey pada triwulan III merupakan akumulasi penilaian survey triwulan I, II dan III</p> <p>Ruang Lingkup: Responden: setiap orang/pihak yang menerima pelayanan jasa kekonsuleran.</p> <p>Indeks Kepuasan Pelayanan Publik diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala 1 s/d 4. Mengacu kepada Tabel Nilai Interval Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai berikut:</p> <p>Nilai Interval Nilai Interval Konversi (NIK) Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan</p> <p>Nilai Interval 25,00% - 64,99% dikonversi dalam Skala 1,00 - 2,5996 = Sangat Tidak Puas Nilai Interval 65,00% - 76,60% dikonversi dalam Skala 2,60 - 3,064 = Tidak Puas Nilai Interval 76,61% - 88,30% dikonversi dalam Skala 3,0644 - 3,532 = Puas Nilai Interval 83,31% - 100% dikonversi dalam Skala 3,5324 - 4,00 = Sangat Puas</p> <p>Pertanyaan kuesioner kiranya dapat merujuk pada 9 (sembilan) unsur SKM yang relevan dengan kegiatan pelayanan, sesuai brafaks dari Pusat.</p> <p>Sumber: PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Bab V halaman 19).</p> <p>Formula:</p> <p>Hasil Survei/Kuesioner Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran</p> <p>Indeks Kepuasan = $(X / P) / Y$</p> <p>X : Total Nilai Jawaban = $R1+R2+R3+Rn...$ R : Jumlah Nilai Jawaban per responden P : Jumlah Pertanyaan Y : Jumlah Responden</p> <p>Tujuan:</p> <p>untuk mengetahui kualitas pelayanan kekonsuleran di Perwakilan KBRI Kuwait City</p>
Satuan Pengukuran :	Indeks
Tingkat Kendali IKU :	() High (X) Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU :	(X) Exact () Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Konsuler Perwakilan RI, Atase Ketenagakerjaan
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Konsuler Perwakilan RI
Sumber Data :	Hasil survey/olah kuesioner kepuasan pelayanan kekonsuleran perwakilan
Jenis Cascading IKU:	(X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading
Metode Cascading :	() Direct (X) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	() Sum (X) Average () Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi :	() Sum () Average (X) Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja :	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN					
s.d TRIWULAN I	4 (skala 4)	4 (skala4)	4 (skala 4)	4 (skala4)	4 (Skala 4)
s.d TRIWULAN II	4 (skala 4)	4 (skala4)	4 (skala 4)	4 (skala4)	4 (Skala 4)
s.d TRIWULAN III	4 (skala 4)	4 (skala4)	4 (skala 4)	4 (skala4)	4 (Skala 4)
s.d TRIWULAN IV	4 (skala 4)	4 (skala4)	4 (skala 4)	4 (skala4)	4 (Skala 4)

Indikator Kinerja Utama:

IKU-3 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI/BHI KBRI Kuwait City

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Kepuasan pelayanan adalah kondisi dimana pelayanan yang diterima sesuai dan/atau lebih baik daripada yang diharapkan oleh penerima jasa.

Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Perwakilan RI.

Sumber: UU No. 25 tahun 2009 tetang Pelayanan Publik

Pelindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI dan BHI di luar negeri termasuk penyediaan bantuan informasi/hukum dan/atau sosial dengan memperhatikan prinsip yang mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak mengambil alih tanggung jawab pidana atau perdata WNI; dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hukum negara setempat serta hukum atau kebiasaan Internasional.

Sumber: Permenlu No. 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri.

WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.

BHI adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan disahkan oleh instansi yang berwajib.

WNI dan BHI dalam hal ini adalah yang berkedudukan di luar negeri.

Ruang Lingkup:

Responden adalah orang/penerima jasa pelayanan Pelindungan WNI dan BHI.

Batasan waktu: Periode Januari-Desember.

Penyampaian survey diberikan kepada responden per pelayanan.

Hasil penilaian kuesioner/survey yang diambil merupakan akumulasi survey hingga periode berjalan, contoh: pada triwulan III merupakan akumulasi dari triwulan I, II dan III

Ruang Lingkup:

Responden adalah orang/penerima jasa pelayanan Pelindungan WNI dan BHI.

Indeks Kepuasan Pelayanan Publik diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala 1 s/d 4. Mengacu kepada Tabel Nilai Interval Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai berikut:

Nilai Interval Nilai Interval Konversi (NIK) Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval 25,00% - 64,99% dikonversi dalam Skala 1,00 - 2,5996 = Sangat Tidak Puas

Nilai Interval 65,00% - 76,60% dikonversi dalam Skala 2,60 - 3,064 = Tidak Puas

Nilai Interval 76,61% - 88,30% dikonversi dalam Skala 3,0644 - 3,532 = Puas

Nilai Interval 83,31% - 100% dikonversi dalam Skala 3,5324 - 4,00 = Sangat Puas

Pertanyaan kuesioner dapat merujuk pada 9 (sembilan) unsur SKM yang relevan dengan kegiatan pelayanan, sesuai brafaks dari Pusat.

Sumber: PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Bab V halaman 19).

Formula:

Hasil Survei/Kuesioner Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI/BHI

Indeks Kepuasan = (X / P) / Y

X : Total Nilai Jawaban = R1+R2+R3+Rn...

R : Jumlah Nilai Jawaban per responden

P : Jumlah Pertanyaan

Y : Jumlah Responden

Tujuan:

untuk mengetahui kualitas pelayanan Pelindungan WNI dan BHI di Perwakilan Kuwait City

Satuan Pengukuran :

Indeks

Tingkat Kendali IKU :

() High

(X) Moderate

() Low

Tingkat Validitas IKU :

(X) Exact

() Proxy

() Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Fungsi Konsuler Perwakilan RI,Atase Ketenagakerjaan

Unit/Pihak Penyedia Data :

Fungsi Konsuler Perwakilan RI, Atase Ketenagakerjaan

Sumber Data :

Hasil survey/olah kuesioner kepuasan pelayanan pelindungan WNI di Perwakilan RI di luar negeri.

Jenis Cascading IKU:

(X) Cascading Peta

() Cascading Non peta

() Non-Cascading

Metode Cascading :

() Direct

(X) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode :

() Sum

(X) Average

() Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi :

() Sum

() Average

(X) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja :

(X) Maximize

() Minimize

() Stabilize

Periode Pelaporan :

() Bulanan

(X) Triwulanan

() Semesteran

() Tahunan

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (Skala 4)
s.d TRIWULAN I	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (Skala 4)
s.d TRIWULAN II	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (Skala 4)
s.d TRIWULAN III	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (Skala 4)
s.d TRIWULAN IV	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (Skala 4)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

C2

Perspektif:	Customer Perspective
Sasaran Strategis:	Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Kuwait City
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Dukungan adalah sokongan/bantuan.</p> <p>Komitmen adalah (upaya) perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu.</p> <p>Tinggi adalah (mendukung) secara penuh.</p> <p>Kesepakatan kerja sama bilateral adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh 2 negara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Kesepakatan kerjasama bilateral melingkupi kesepakatan internasional yang merupakan perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.</p> <p>Latar belakang: Pada tingkat bilateral serta forum-forum regional dan multilateral terdapat kesepakatan-kesepakatan yang disetujui bersama oleh Indonesia dan negara-negara lain. Kesepakatan tersebut perlu diimplementasikan agar dapat dirasakan kemanafaatannya oleh rakyat.</p>
Sub Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	<p>Definisi:</p> <p>Tindakanlanjut/implementasi: Tindakan yang diambil untuk langkah-langkah selanjutnya/pelaksanaan, penerapan oleh stakeholder terkait baik di negara Indonesia maupun di negara akreditasi.</p> <p>Kesepakatan kerja sama bilateral: perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh 2 negara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.</p> <p>Negara Akreditasi/wilayah kerja : tempat kedudukan Perwakilan RI beserta negara/wilayah kerja rangkaian dan organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI.</p> <p>Rencana kesepatan yang akan ditindaklanjuti terdapat pada Dokumen Pemetaan Tindakanlanjut/Implementasi Kesepakatan Indonesia yang disusun oleh Perwakilan RI. Dokumen pemetaan tersebut adalah rekapitulasi rencana kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dan disusun di awal tahun.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah kesepakatan bilateral yang ditindaklanjuti/diimplementasikan}}{\text{Jumlah rencana kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi beserta negara rangkaian yang akan ditindaklanjuti sesuai Dokumen Pemetaan Tindakanlanjut/Implementasi Kesepakatan Indonesia KBRI Kuwait}} \times 100\%$ <p>Tujuan:</p> <p>Mengukur kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Kuwait City yang ditindaklanjuti</p>
Satuan Pengukuran :	Persentase
Tingkat Kendali IKU :	() High (X) Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU :	() Exact (X) Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Politik, Ekonomi, Pensosbud dan Protokol Konsuler
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Politik, Ekonomi, Pensosbud dan Protokol Konsuler
Sumber Data :	Rekapitulasi dokumen dari tindak lanjut kesepakatan berdasarkan laporan pertemuan/kegiatan, brafaks perwakilan, surat dari/kepada K/L teknis, pernyataan pers, liputan media, pidato pejabat, website <i>treaty room</i>
Jenis Cascading IKU:	(X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading
Metode Cascading :	() Direct (X) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	() Sum () Average (X) Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi :	() Sum () Average (X) Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja :	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	5,8%	5,8%	100%	100%	100%
s.d TRIWULAN 1	N/A	N/A	-	-	-
s.d TRIWULAN 2	N/A	N/A	-	-	-
s.d TRIWULAN 3	N/A	N/A	-	-	-
s.d TRIWULAN 4	5,8%	5,8%	100%	100%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

B1

Perspektif:	Business Process
Sasaran Strategis:	Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya KBRI Kuwait City yang Kuat
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Diplomasi ekonomi adalah diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi melalui berbagai kerja sama seperti perdagangan, investasi, energi, perhubungan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perpajakan, kerja sama ekonomi teknik.</p> <p>Negara Akreditasi/wilayah kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI beserta negara akreditasi/wilayah kerja dan organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI.</p> <p>Diplomasi sosial adalah aktivitas diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial melalui berbagai kerja sama seperti pembangunan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan.</p> <p>Diplomasi budaya adalah aktivitas diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan pelestarian dan pengenalan budaya Indonesia kepada dunia internasional, dengan penggunaan aset budaya nasional untuk mendukung pemenuhan tujuan kebijakan luar negeri Indonesia.</p> <p>Kuat adalah mempunyai keunggulan untuk bersaing dengan negara lain.</p>
Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	<p>Definisi:</p> <p>Kesepakatan adalah hasil kesepakatan pada setiap proses perundingan di bidang ekonomi, sosial dan budaya</p> <p>Ruang lingkup kesepakatan bidang ekonomi mencakup antara lain: perdagangan, investasi, energi, perhubungan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perpajakan, kerja sama ekonomi teknik</p> <p>Ruang lingkup kesepakatan bidang sosial dan budaya mencakup antara lain: kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, olahraga, riset dan teknologi, pertukaran budaya, pelestarian aset-aset budaya, bencana alam, flora dan fauna</p> <p>Batas waktu: Jumlah kesepakatan yang disepakati selama satu periode anggaran.</p> <p>Ruang lingkup: Kesepakatan kerja sama bilateral juga termasuk dalam kerangka kerjasama yang dibentuk antara Pemerintah nasional/negara bagian/wilayah kerja dengan stakeholders terkait di Indonesia (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Parlemen, lembaga tinktank, lembaga pendidikan, dan badan usaha).</p> <p>Formula:</p> <p>Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi dan sosial budaya yang terealisasi</p> <p>Tujuan:</p> <p>mengukur sejauh mana diplomasi ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan telah dijalankan dengan efektif dan berkualitas</p>
Satuan Pengukuran :	Jumlah
Tingkat Kendali IKU :	() High (X) Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU :	() Exact (X) Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pensosbud
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pensosbud
Sumber Data :	Records of Discussion (RoD), Naskah Kesepakatan, Diplomatic Notes, Joint Statement, Declaration, Joint Communique, Letter of Intent, Chairman's Note, Memorandum of Understanding, Exchange of Notes, Summary Record, Agreed Minutes, Treaty, Minutes of Meeting, Laporan Perwakilan RI.
Jenis Cascading IKU:	(X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading
Metode Cascading :	() Direct (X) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	() Sum () Average (X) Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi :	(X) Sum () Average () Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja :	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	2	3	2	2	3
s.d TRIWULAN I	-	-	-	-	1
s.d TRIWULAN II	-	-	1	-	1
s.d TRIWULAN III	-	-	1	-	1
s.d TRIWULAN IV	2	3	2	2	3

Indikator Kinerja Utama:

IKU-2 Indeks Respon Positif terhadap Informasi Data Economic Intelligence/Market Intelligence KBRI Kuwait City

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Latar Belakang:

Dalam menjalankan diplomasi ekonomi, Perwakilan RI harus mencermati potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing negara yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

Definisi:

Data economic intelligence/market intelligence adalah informasi dan kajian hasil analisis di bidang ekonomi (perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, dan jasa) termasuk informasi peluang produk spesifik yang bersifat strategis bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara/wilayah akreditasi. Data economic intelligence disusun dan dimutakhirkan secara berkala setiap tahun dari masing-masing negara/wilayah kerja dan rangkاپannya, jika ada. Contoh: KBRI Kuwait City menyusun dua data economic intelligence untuk Negara Australia dan Negara Vanuatu.

Respon positif adalah Pernyataan yang mengindikasikan Data Economic Intelligence/Market Intelligence yang dihasilkan bermanfaat bagi Kemenlu Pusat. Pernyataan tersebut diperoleh dari penerima manfaat.

Indeks skala 1-5, yaitu:

Skala 1: Tidak Bermanfaat

Skala 2: Kurang Bermanfaat

Skala 3: Cukup Bermanfaat

Skala 4: Bermanfaat

Skala 5: Sangat Bermanfaat

(Disesuaikan dengan Brafaks)

Penilaian dilakukan oleh Kemenlu Pusat.

Data economic intelligence periode observasi tahun sebelumnya disampaikan ke Pusat pada Triwulan I tahun berjalan.

Respon data economic intelligence diperoleh Perwakilan RI dari Pusat pada Triwulan III tahun berjalan.

Ruang lingkup data economic intelligence adalah:

1. Gambaran Umum Ekonomi Negara Akreditasi/Wilayah Kerja

2. Kebijakan Ekonomi di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja

3. Kiat Mengembangkan Bisnis di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja

4. Prospek ekonomi dan bisnis di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja yang meliputi: Perdagangan, Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Jasa dan kerja sama Keuangan dan Pembangunan

5. Kontak Informasi Bisnis

FORMAT DATA ECONOMIC INTELLIGENCE PERWAKILAN RI :

I. Kata Pengantar

II. Daftar Isi

III. Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan serta ruang lingkup dari penyusunan Data Economic Intelligence.

IV. Gambaran Umum Ekonomi Negara Akreditasi / Wilayah Kerja

- Menjelaskan kondisi umum perekonomian negara akreditasi / wilayah kerja dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi aktivitas ekonomi dan iklim bisnis seperti stabilitas politik, keamanan dan budaya, serta dilengkapi dengan data sejumlah indikator ekonomi makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, laju inflasi, budget/anggaran belanja pemerintah, defisit anggaran, tingkat pengangguran, nilai tukar, dan tingkat suku bunga dalam bentuk chart atau tabel.

- Bagi Konsulat dan Konsulat Jenderal yang memiliki informasi spesifik kondisi perekonomian di wilayah kerjanya dapat memberikan masukan untuk melengkapi informasi gambaran umum ekonomi negara akreditasi.

- Sebagai bahan rujukan dalam peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara akreditasi / wilayah kerja, agar dicantumkan informasi mengenai kesepakatan/perjanjian kerja sama ekonomi yang telah ditandatangani.

V. Kebijakan Ekonomi di Negara Akreditasi / Wilayah Kerja

Menjelaskan kebijakan ekonomi yang diberlakukan di negara akreditasi / wilayah kerja, termasuk regulasi terkait dengan insentif ekonomi dan bisnis di sektor perdagangan (barang dan jasa), investasi, pariwisata, jasa skilled worker dan jasa lainnya; akses pasar (barang dan jasa), regulasi yang bersifat protektif antara lain kebijakan substitusi impor, hambatan tarif dan non tarif, regulasi jasa serta kebijakan perbankan dan kepabeanan.

Bagi Konsulat dan Konsulat Jenderal yang memiliki informasi spesifik kebijakan ekonomi di wilayah kerjanya dapat memberikan masukan untuk melengkapi informasi kebijakan ekonomi yang berlaku di tingkat nasional negara akreditasi.

VI. Kiat Mengembangkan Bisnis di Negara Akreditasi / Wilayah Kerja

Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengembangan bisnis ke negara akreditasi / wilayah kerja, seperti budaya bisnis, regim keuangan/perbankan yang berlaku, sistem pembayaran, prosedur ekspor impor, proses pembukaan kantor perwakilan dagang atau cabang usaha swasta, prosedur investasi, dan strategi menjalin kemitraan antar tour operator.

VII. Prospek Ekonomi dan Bisnis di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja

VII.1. Perdagangan

a. Produk impor dan ekspor utama negara akreditasi, dengan dilengkapi data statistik minimal 3 tahun terakhir dari otoritas setempat.

b. Negara importir dan tujuan ekspor utama, dengan dilengkapi data statistik minimal 3 tahun terakhir dari otoritas setempat.

c. Peringkat perdagangan Indonesia di negara akreditasi dibandingkan dengan negara pesaing utama, termasuk negara ASEAN selama minimal 3 tahun terakhir.

d. Analisis jenis produk perdagangan yang potensial untuk dikembangkan, termasuk kondisi pangsa pasar, harga produk dan negara pesaing/kompetitor, ketentuan sertifikasi/standar kualitas produk yang harus dipenuhi serta kiat/strategi bisnis yang perlu diperhatikan/dilakukan pelaku usaha Indonesia, seperti menjalin kemitraan atau mengikuti promosi, saluran distribusi dan target pasar.

VII.2 Investasi

a. Sektor investasi terbuka dan tertutup (negative list) di negara akreditasi .

b. Negara investor utama di negara akreditasi dan negara tujuan investasi utama, dengan dilengkapi data statistik nilai/proyek investasi minimal 3 tahun terakhir dari otoritas setempat.

c. Analisis sektor investasi potensial untuk dikembangkan, baik di negara akreditasi ataupun di Indonesia, investor pesaing/ kompetitor, ketentuan khusus yang berlaku pada sektor investasi potensial, perlindungan terhadap investor dan kemungkinan resiko yang perlu diantisipasi (jika ada), serta kiat menarik pengusaha di negara akreditasi berinvestasi di Indonesia.

VII.3 Pariwisata

a. Negara asal dan tujuan wisata utama, dengan dilengkapi data statistik dan trend minimal 3 tahun terakhir.

b. Karakteristik produk wisata yang diminati dan telah dijual negara pesaing kepada wisatawan dari negara akreditasi, seperti produk wisata alam, budaya, sejarah, religi, kuliner, dan belanja.

c. Karakteristik turis yang mendaratangi tempat wisata (jika ada).

d. Potensi pembukaan jalur penerbangan Indonesia dengan negara akreditasi / wilayah kerja (jika ada).

e. Analisis jenis produk wisata potensial untuk dikembangkan, termasuk upaya pengembangan paket wisata bersama, strategi promosi untuk menarik wisatawan dari negara akreditasi ke Indonesia.

VII.4. Jasa
a. Jenis jasa skilled worker utama yang terdapat di pasar tenaga kerja negara akreditasi / wilayah kerja, dengan dilengkapi data statistik dan trend minimal 3 tahun terakhir.
b. Negara asal skilled worker utama yang terdapat di negara akreditasi / wilayah kerja dengan dilengkapi data statistik dan trend minimal 3 tahun terakhir.
c. Jenis skilled worker asal Indonesia yang terdapat di negara akreditasi / wilayah kerja dengan dilengkapi data statistik dan trend minimal 3 tahun terakhir.
d. Analisis peluang kerja sektor skilled worker di negara akreditasi / wilayah kerja yang potensial bagi Indonesia serta skala penghasilannya.

VII.5. Kerja sama Keuangan dan Pembangunan (jika ada)
a. Bentuk skema pendanaan dan kerja sama pembangunan yang diberikan negara akreditasi / wilayah kerja kepada lembaga/ negara lain dengan dilengkapi data statistik dan trend minimal 3 tahun terakhir.
b. Lembaga/Negara penerima fasilitas/skema pendanaan pembangunan dari negara akreditasi / wilayah kerja.
c. Potensi pendanaan yang dapat dimanfaatkan Indonesia dan ruang lingkup sektor ekonomi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh sumber pendanaan dari negara akreditasi / wilayah kerja.

VIII. Kontak Informasi Bisnis
Menginformasikan daftar contact person dan alamat pihak-pihak terkait (Instansi Pemerintah, Kadin, Asosiasi Pengusaha, Bank Koresponden) di negara akreditasi / wilayah kerja.

Formula:

Hasil Survei Kuesioner

Tujuan:

Untuk mengetahui data economic intelligence yang dihasilkan memiliki manfaat bagi stakeholders.

Satuan Pengukuran :

Indeks

Tingkat Kendali IKU :

() High (X) Moderate () Low

Tingkat Validitas IKU :

() Exact (X) Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Fungsi Ekonomi

Unit/Pihak Penyedia Data :

Fungsi Ekonomi

Sumber Data :

Brafaks dari Kemenlu Pusat terkait hasil penilaian

Jenis Cascading IKU:

(X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading

Metode Cascading :

() Direct (X) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode :

() Sum () Average (X) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi :

() Sum () Average () Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja :

(X) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan :

() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	4 (skala5)	3 (skala 5)	4 (skala 5)	5 (skala 5)	5 (skala 5)
s.d TRIWULAN I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d TRIWULAN II	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d TRIWULAN III	N/A	N/A	N/A	N/A	5 (skala 5)
s.d TRIWULAN IV	4 (skala 5)	3 (skala 5)	4 (skala 5)	5 (skala 5)	5(skala 5)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

B2

Perspektif:	Business Process
Sasaran Strategis:	Diplomasi Polkam KBRI Kuwait City yang Kuat
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Diplomasi Politik dan Keamanan adalah Negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua Negara atau lebih mengenai hubungan politik antara dua negara atau lebih, juga mengenai keamanan pada masing-masing negara.</p> <p>Kuat adalah mempunyai keunggulan/tidak mudah goyah.</p> <p>Latar belakang: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dalam kaitan ini, pelaksanaan perundingan penetapan batas maritim, penegakan batas darat serta penanganan isu kelautan, darat, udara dan antariksa merupakan manifestasi polugri bebas aktif dalam upaya mengamankan kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim khususnya terkait dengan batas negara, kedaulatan dan sumberdaya alam. Sebagai bagian dari amanah kinerja Presiden Jokowi, isu maritim dan polkam menjadi salah satu isu prioritas yang menjadi tanggung jawab Kemenlu, sehingga Indonesia akan menonjolkan karakter sebagai negara maritim dalam diplomasi dan kebijakan politik luar negerinya.</p>
Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan di Bidang Diplomasi Polkam
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	<p>Definisi:</p> <p>Kesepakatan hasil perundingan: Hasil kesepakatan pada setiap proses perundingan.</p> <p>Diplomasi Politik dan Keamanan adalah Negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua Negara atau lebih mengenai hubungan politik antara dua negara atau lebih, juga mengenai keamanan pada masing-masing negara.</p> <p>Batas waktu: Jumlah kesepakatan yang disepakati selama satu periode anggaran. Ruang lingkup: Kesepakatan kerja sama bilateral juga termasuk dalam kerangka kerjasama yang dibentuk antara Pemerintah nasional/negara bagian/wilayah kerja dengan Pemerintah pusat/daerah di Indonesia.</p> <p>Formula:</p> <p style="text-align: center;">Jumlah kesepakatan di bidang Polkam yang terealisasi</p> <p>Tujuan:</p> <p>Untuk mengetahui hasil konkrit atau output dari negosiasi atau perundingan di bidang diplomasi polkam yang telah dilakukan oleh Perwakilan RI</p>
Satuan Pengukuran :	Jumlah
Tingkat Kendali IKU :	() High (X) Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU :	() Exact (X) Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Politik
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Politik
Sumber Data :	Records of Discussion (RoD), Naskah Kesepakatan, Diplomatic Notes, Joint Statement, Declaration, Joint Communiqué, Letter of Intent, Chairman's Note, Memorandum of Understanding, Exchange of Notes, Chairman's Statement, Summary Record, Agreed Minutes, Treaty, Minutes of Meeting.
Jenis Cascading IKU:	(X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading
Metode Cascading :	() Direct (X) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	(X) Sum () Average () Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi :	(X) Sum () Average () Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja :	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	2	2	1	1	1
s.d TRIWULAN I	-	-	-	-	-
s.d TRIWULAN II	-	-	-	-	-
s.d TRIWULAN III	-	-	1	1	1
s.d TRIWULAN IV	2	2	1	1	1

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

B3

Perspektif:

Internal Business Process

Sasaran Strategis:

Basis Data WNI KBRI Kuwait City yang Akurat

Deskripsi Sasaran Strategis:

Definisi:

Basis data adalah kumpulan data WNI yg disimpan secara sistematis secara daring dan/atau luring dalam sistem informasi pelayanan dan perlindungan WNI yg dapat diolah untuk menghasilkan informasi.

WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.

Ruang lingkup: WNI dalam hal ini adalah yang berkedudukan di luar negeri.

Akurat adalah teliti; saksama; cermat; tepat benar.

Basis data WNI yang akurat berarti terwujudnya kumpulan data WNI yang tepat benar yang disimpan secara sistematis secara daring dan/atau luring dalam sistem informasi pelayanan dan perlindungan WNI yg dapat diolah untuk menghasilkan informasi mengenai WNI di luar negeri.

Latar Belakang:

Terdapat kebutuhan yang tinggi terhadap data WNI yang akurat di luar negeri untuk mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia". Saat ini, data WNI di luar negeri tidak terkoneksi satu sama lain dan tidak terintegrasi dengan sistem data nasional. Data yang terdapat di Kemlu, berbeda dengan data yang terdapat pada KPU, BNP2TKI, Perbankan, Ditjen Imigrasi maupun Dukcapil. Data yang tidak terintegrasi mengakibatkan data tidak akurat, data ganda dan mempersulit Pemerintah Indonesia dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri yang berkualitas.

Indikator Kinerja Utama:

IKU-1 Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Kuwait City yang Teraftar di Portal Peduli WNI

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Teraftar berarti WNI yang datanya tercantum di Portal Peduli WNI dan telah terverifikasi oleh Perwakilan RI di luar negeri

WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.

Persentase jumlah WNI yang terdaftar di Portal Peduli WNI menghitung persentase data WNI yang tercantum dan terverifikasi oleh Perwakilan RI di luar negeri di Portal Peduli WNI dibanding Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) WNI di wilayah kerja Perwakilan RI pada Pemilu 2019.

Latar Belakang:

Portal Peduli WNI adalah sistem informasi pelayanan dan perlindungan terpadu bagi WNI di luar negeri yang telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tahun 2018. Untuk mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia", Portal Peduli WNI telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemdagri (SIKAK); Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Kemkumham (SIMKIM); Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri BP2MI (SISKOTKLN) serta sistem pendataan dan pelayanan nasional lainnya.

Selain mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia", jumlah WNI yang terdaftar pada Portal Peduli WNI dapat mempermudah proses pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri, dan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri secara lebih baik dan akurat.

Data pembandingan/pembagi adalah data DPT Pemilu tahun 2019 karena data tersebut dianggap sebagai data yang paling valid dan terbaru dibandingkan data-data lainnya.

Formula:

(WPO/WDPT) x 100%

WPO: Jumlah WNI yang tercantum dan terverifikasi di Portal Peduli WNI

WDPT: Total jumlah WNI pada DPT 2019 x 100%

Target minimal WPO :

2020 = 20% jumlah WNI yang terverifikasi datanya di Portal Peduli WNI

2021 = 50% jumlah WNI yang terverifikasi datanya di Portal Peduli WNI

2023 = 80% jumlah WNI yang terverifikasi datanya di Portal Peduli WNI

2024 = 100% jumlah WNI yang terverifikasi datanya di Portal Peduli WNI

Contoh: DPT Pemilu tahun 2019 di wilayah kerja KBRI Canberra adalah 10.000 WNI, maka pada tahun 2020, KBRI Canberra paling sedikit harus mendorong lapor diri WNI dan memverifikasi minimal 2.000 WNI pada Portal Peduli WNI. Pada tahun 2021, 5.000 WNI, pada tahun 2023, 8.000 WNI dan pada tahun 2024, 10.000 WNI.

Tujuan:

Mengukur persentase jumlah WNI yang datanya tercantum dan terverifikasi di Portal Peduli WNI

Satuan Pengukuran :

Persentase

Tingkat Kendali IKU :

() High

(X) Moderate

() Low

Tingkat Validitas IKU :

(X) Exact

() Proxy

() Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Fungsi Konsuler Perwakilan RI

Unit/Pihak Penyedia Data :

Fungsi Konsuler Perwakilan RI, Atase Imigrasi, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Atase Ketenagakerjaan dan Atase Perhubungan.

Sumber Data :

Database Portal Peduli WNI

Jenis Cascading IKU:

(X) Cascading Peta

() Cascading Non peta

() Non-Cascading

Metode Cascading :

() Direct

(X) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode :

() Sum

(X) Average

() Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi :

() Sum

() Average

(X) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja :

(X) Maximize

() Minimize

() Stabilize

Periode Pelaporan :

() Bulanan

(X) Triwulanan

() Semesteran

() Tahunan

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	20%	N/A	50%
s.d TRIWULAN I	N/A	N/A	5%	5,49%	15%
s.d TRIWULAN II	N/A	N/A	10%	10,97%	15%
s.d TRIWULAN III	N/A	N/A	15%	14,48%	35%
s.d TRIWULAN IV	N/A	N/A	20%	23,27%	50%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

L1

Perspektif:	Learning and Growth		
Sasaran Strategis:	Tata Kelola Organisasi KBRI Kuwait City yang Baik		
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Definisi: Organisasi adalah kesatuan bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.</p> <p>Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarah, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi.</p>		
Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Kuwait City		
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	<p>Definisi:</p> <p>Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.</p> <p>Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 25%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaian kinerja: 20%.</p> <p>Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik (4) B (Skor > 60-70); Baik (5) CC (>50-60); Cukup (6) C (>30-50); Kurang (7) D (0-30); Sangat Kurang</p> <p>Formula:</p> <p align="center">-</p> <p>Tujuan:</p> <p>untuk mengukur sejauh mana Perwakilan RI telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.</p>		
Satuan Pengukuran :	Nilai (kategori)		
Tingkat Kendali IKU :	() High (X) Moderate () Low		
Tingkat Validitas IKU :	(X) Exact () Proxy () Activity		
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Seluruh Fungsi		
Unit/Pihak Penyedia Data :	Inspektorat Jenderal		
Sumber Data :	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Jenderal		
Jenis Cascading IKU:	(X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading		
Metode Cascading :	() Direct (X) Indirect		
Jenis Konsolidasi Periode :	() Sum () Average (X) Take Last Known Value		
Jenis Konsolidasi Lokasi :	() Sum () Average (X) Raw data		
Polarisasi Indikator Kinerja :	(X) Maximize () Minimize () Stabilize		
Periode Pelaporan :	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan		

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	77 (BB)	73 (BB)	78 (BB)	74,90 (BB)	79 (BB)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

L2

Perspektif:	Learning and Growth
Sasaran Strategis:	Sarana dan Prasarana KBRI Kuwait City yang Memadai
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan.</p> <p>Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.</p> <p>Sarana dan prasarana sangat menunjang kinerja Perwakilan RI dan merupakan salah satu prioritas Kemenlu dalam pemenuhannya dengan program tersendiri.</p> <p>Memadai adalah terpenuhi sesuai dengan rencana kebutuhan yang tercantum dalam DIPA.</p>
Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Persentase Sarana dan Prasarana KBRI Kuwait City yang Dipenuhi Sesuai dengan Rencana
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	<p>Definisi:</p> <p>Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan.</p> <p>Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.</p> <p>Yang dipenuhi sesuai dengan rencana adalah terpenuhi sesuai dengan rencana kebutuhan yang tercantum dalam DIPA.</p> <p>Batasan Waktu: 1 tahun Anggaran</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi sesuai dengan DIPA}}{\text{Total sarana dan prasarana yang direncanakan dalam dokumen DIPA}} \times 100\%$ <p>Tujuan:</p> <p>untuk mengukur seberapa jauh memadai sarana dan prasarana KBRI Kuwait City dalam mendukung kinerja</p>
Satuan Pengukuran :	Persentase
Tingkat Kendali IKU :	() High (X) Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU :	() Exact (X) Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	HOC
Unit/Pihak Penyedia Data :	BPKRT
Sumber Data :	Laporan realisasi pemenuhan sarana dan prasarana
Jenis Cascading IKU:	(X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading
Metode Cascading :	() Direct (X) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	() Sum () Average (X) Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi :	() Sum () Average (X) Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja :	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	100%	100%	100%	100%	100%
s.d TRIWULAN I	25%	0	25%	0	25%
s.d TRIWULAN II	50%	74,44%	50%	0	50%
s.d TRIWULAN III	75%	76,89%	75%	93,18%	75%
s.d TRIWULAN IV	100%	100%	100%	100%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Perspektif:	Learning and Growth		
Sasaran Strategis:	Pengelolaan Anggaran KBRI Kuwait City yang Optimal		
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Pengelolaan Anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penguangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan Laporan Keuangan. Optimal berarti paling baik dan tertinggi</p> <p>Ruang lingkup: Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan.</p>		
Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Nilai Kinerja Anggaran KBRI Kuwait City		
Deskripsi Indikator Kineria Utama:	<p>Definisi:</p> <p>Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh pihak luar di luar Kementerian Luar Negeri yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri dari dua perhitungan, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Bobot untuk variabel tersebut masing-masing sebesar 60% dan 40%.</p> <p>Nilai evaluasi kinerja anggaran tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Sementara, nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan nilai indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran K/L yang tercantum pada sistem informasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.</p> <p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu: Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan terhadap regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, Efisiensi pelaksanaan Kegiatan. Indikator IKPA diantaranya: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Retur SP2D, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Kesalahan SPM, Perencanaan Kas.</p> <p>Sedangkan kriteria pada SMART merupakan pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam tuisi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.</p> <p>Formula:</p> <p>60% Nilai SMART + 40% Nilai IKPA</p> <p>Tujuan:</p> <p>untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja anggaran KBRI Kuwait City</p>		
Satuan Pengukuran :	Nilai		
Tingkat Kendali IKU :	() High	(X) Moderate	(X) Low
Tingkat Validitas IKU :	(X) Exact	() Proxy	() Aktivitas
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Seluruh Fungsi		
Unit/Pihak Penyedia Data :	Kementerian Keuangan		
Sumber Data :	Aplikasi SMART Kemenkeu dan Aplikasi SPAN Kemenkeu		

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2017		2018		2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	77.65	91
s.d TRIWULAN I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	11	40
s.d TRIWULAN II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	13	60
s.d TRIWULAN III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	21.85	75
s.d TRIWULAN IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	77.65	91

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI NOMOR 006A/SK/KEPPRI/I/2021 TENTANG PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERWAKILAN RI KUWAIT CITY

DOKUMEN *MAPPING* TINDAKLANJUT/IMPLEMENTASI KESEPAKATAN INTERNASIONAL PERWAKILAN RI KUWAIT CITY TAHUN 2021

No	Dokumen Kesepakatan	Waktu Berlaku Kesepakatan	Rencana Ditindaklanjuti						Substansi Yang Ditindaklanjuti	Stakeholders Terkait	Target Hasil Tindaklanjuti	PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1	MOU Perjanjian Bebas Visa Diplomatik, Spesial dan Dinas	20 Maret 2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	WNI pemegang paspor diplomatic dan dinas tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk, singgah dan tinggal di wilayah Kuwait selama 30 Hari	Kemenlu RI-Kuwait	Peningkatan jumlah saling kunjung pejabat pemerintah kedua negara	Fungsi Politik, Fungsi Protkons
2	MoU Kerja Sama Migas dan Petrokimia	April 2021	-	✓	✓	✓	✓	✓	Peningkatan investasi Indonesia ke Kuwait		Masuknya BUMN Indonesia di proyek migas dan petrokimia kuwait	Fungsi Ekonomi
3	Perjanjian Kerjasama Perdagangan Indonesia dan Kuwait	2007	✓	✓					Pelaksanaan Joint Trade Committee	Kemendag RI-Kuwait		Fungsi Ekonomi
4	MoU mengenai Pembentukan Komite Bersama untuk Kerjasama	2007	-	✓					Pelaksanaan SKB ke II di Indonesia	Kemenlu RI-Kuwait		Semua Fungsi